



Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan 2023

**Integritas Kuat,
Peradilan
Bermartabat**



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ringkasan Eksekutif
LAPORAN TAHUNAN 2023

**Integritas Kuat,
Peradilan Bermartabat**



Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Agung RI



Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
(Purnabakti tanggal 31 Januari 2023)



Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
(Dilantik sejak tanggal 1 Februari 2023)



Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI



Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.
Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI



Mayjen TNI (Purn) Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI



I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI



Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI



H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.
Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI
(Dilantik sejak 21 Juli 2023)



Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI
(Purnabakti tanggal 1 Mei 2023)



H. Suharto, S.H., M.Hum.
Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI
(Dilantik sejak 23 Oktober 2023)



Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI
(Purnabakti tanggal 1 Oktober 2023)

Daftar Isi

07	Penjelasan Tema	37	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
08	Bab 1 Manajemen Perkara	39	PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL
08	PROGRAM PEMBARUAN	40	Bab 4 Manajemen Keuangan, Aset, dan Teknologi Informasi
13	KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA	40	PROGRAM PEMBARUAN
19	PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING	41	MANAJEMEN KEUANGAN
19	PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA	44	MANAJEMEN ASET
20	KINERJA PENANGANAN PERKARA MELALUI LAYANAN PENGADILAN ELEKTRONIK	44	MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI
21	AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN	46	Bab 5 Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan dan Putusan- Putusan Penting (Landmark Decisions)
23	PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN	46	PROGRAM PEMBARUAN
23	PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI DAN DIVERSI	46	PROGRAM PENYUSUNAN REKOMENDASI PEMBENTUKAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN
24	PENANGANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA KE LUAR NEGERI	47	PUBLIKASI
24	RASIO BEBAN DAN KINERJA PENANGANAN PERKARA	47	PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS)
26	KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA	52	Bab 6 Pengawasan
28	Bab 2 Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap Keadilan	52	PROGRAM PEMBARUAN
28	REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG	52	PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN
32	AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	54	PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN
36	Bab 3 Manajemen Sumber Daya Manusia	57	LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
36	PROGRAM PEMBARUAN	58	Bab 7 Peran Serta dan Kerja Sama
37	REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA	58	KERJA SAMA
		63	PERAN SERTA PADA FORUM INTERNASIONAL



Integritas Kuat, Peradilan Bermartabat

Integritas kuat merupakan keniscayaan bagi seluruh insan peradilan yang berada di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Wujud nyata dari integritas harus dapat dilihat, didengar, dan dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan melalui pelayanan hukum yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta berkeadilan. Integritas kuat merupakan fondasi utama dalam membangun peradilan yang bermartabat. Integritas dan martabat bagi lembaga peradilan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, keduanya saling berkelindan. Dengan demikian, tidak ada peradilan yang bermartabat tanpa integritas.



Bab 1

Manajemen Perkara

PROGRAM PEMBARUAN

Berbagai capaian pembaruan bidang teknis dan manajemen perkara selama 13 tahun implementasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan (2010--2023) telah berhasil mengubah wajah peradilan Indonesia menjadi pengadilan modern berbasis teknologi informasi. Karakteristik badan peradilan Indonesia yang agung sebagaimana digambarkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan kini semakin jelas terlihat. Program pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara dapat diketahui dari pelbagai regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung, maupun Keputusan Pejabat Eselon I lainnya sebagaimana tergambar dalam uraian berikut ini.

PEMBARUAN BIDANG TEKNIS

Implementasi peran pembaruan dalam bidang teknis oleh Mahkamah Agung merujuk Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Norma tersebut memberikan kewenangan kepada

Mahkamah Agung untuk membuat peraturan guna mengisi kekurangan atau kekosongan hukum sehingga penyelenggaraan fungsi peradilan berjalan secara efektif. Pembaruan bidang teknis yudisial yang dilakukan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Pengaturan Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

Peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga Mahkamah Agung perlu melakukan penyesuaian materi muatan SK KMA Nomor 36/KMA/SK/I/2013 dan meningkatkan level pengaturannya menjadi Peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup mengintegrasikan beberapa aturan kebijakan yang terkait dengan penanganan perkara lingkungan hidup.

Salah satu kekosongan norma hukum yang diisi oleh Perma Nomor 1 Tahun 2023 adalah pengaturan gugatan warga negara. Gugatan warga negara dalam tradisi *common*

law system dikenal dengan *citizen lawsuit*. Di samping itu, Perma Nomor 1 Tahun 2023 juga memberikan pengaturan terperinci tentang bukti ilmiah sebagai salah satu bukti dalam pemeriksaan sengketa lingkungan hidup.

Pengaturan Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan

Ketentuan hukum acara penyelesaian penyelesaian sengketa pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil dan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) belum diatur secara terperinci sehingga perlu dibentuk aturan penyelesaian sengketa yang memberi kemudahan bagi pencari keadilan dan sejalan dengan asas beracara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan yang mengusung pembaruan teknis adalah sebagai berikut.

- a. Gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- b. Prosedur pengajuan gugatan secara elektronik dilakukan melalui sistem informasi pengadilan.
- c. Perma Nomor 2 Tahun 2023 membatasi tenggang waktu maksimal bagi majelis hakim untuk memutus perkara. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menjatuhkan putusan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak agenda sidang kesimpulan. Mahkamah Agung memutus perkara paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak penunjukan majelis hakim.

Penyempurnaan Aturan Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase

Perkembangan praktik arbitrase, termasuk hadirnya arbitrase syariah, baik pada tingkat nasional maupun internasional belum terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Kebutuhan akan pengaturan secara terperinci menjadi latar belakang diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan, dan Pembatalan Putusan Arbitrase.

Beberapa materi muatan Perma Nomor 3 Tahun 2023 yang mengandung aspek pengisian kekosongan hukum, perincian norma, dan pembaruan fungsi teknis adalah sebagai berikut.

1. Pembagian kompetensi absolut antara pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.
2. Pengaturan materi muatan yang lebih terperinci.
3. Eksekutur atas putusan arbitrase internasional/ putusan arbitrase syariah internasional sebagai salah satu pihak dalam sengketa dapat diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, atau Ketua Kamar Perdata/Ketua Kamar Agama.
4. Proses administrasi pendaftaran putusan arbitrase/ arbitrase syariah nasional ataupun internasional dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Pengaturan Tata Cara Pemanggilan/ Pemberitahuan Menggunakan Surat Tercatat

Sistem pengadilan elektronik (e-Court) telah mendisrupsi beberapa konsep hukum acara dengan memperkenalkan konsepsi baru. Pemanggilan dan pemberitahuan menggunakan surat tercatat merupakan cara baru yang

berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam HIR/RBG. Untuk mewujudkan keseragaman pemahaman dan praktiknya, Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Mahkamah Agung melakukan pembaruan konsep sah dan patutnya sebuah panggilan yang tidak lagi bertumpu pada jurusita ataupun jurusita pengganti, tapi beralih kepada pemberi perintah, yakni majelis hakim. Pemanggilan dan pemberitahuan oleh pihak ketiga dari penyedia jasa pengiriman dokumen melalui mekanisme surat tercatat dikualifikasikan sebagai sah dan resmi karena diperintah oleh majelis hakim yang memiliki otoritas yuridis.

Perubahan lainnya terjadi pada tindakan apabila pihak berperkara tidak dijumpai secara pribadi (*in person*) di tempat kediaman atau tempat tinggalnya, Panggilan dan pemberitahuan dapat disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah, resepsionis, ataupun petugas keamanan apartemen atau rumah susun, sepanjang mereka bukan pihak lawan dan bersedia difoto diri dan difoto kartu identitasnya.

Penerbitan Surat Edaran untuk Kesatuan Penerapan Hukum dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

Perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat Indonesia. Penerapan hukum dalam putusan pengadilan terhadap permohonan Perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan tidak konsisten sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu kritik publik terhadap lembaga peradilan.

Mahkamah Agung merespons hal tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan yang memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dengan

memberi petunjuk kepada para hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan berbeda agama dan kepercayaan harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut.

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Penerbitan Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik

Salah satu capaian pembaruan peradilan tahun 2023 adalah terbitnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK/HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik.

Pengajuan upaya hukum secara elektronik dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-Court dan e-Berpadu. E-Court digunakan sebagai media pengajuan hukum elektronik untuk perkara perdata umum, perdata khusus, perdata agama, tata usaha negara, banding arbitrase/arbitrase syariah, dan/atau peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak. Sementara itu, E-Berpadu digunakan sebagai media pengajuan upaya hukum elektronik untuk perkara pidana umum, pidana khusus, jinayat, dan pidana militer.

Pemberlakuan Rumusan Hukum Kesepakatan Pleno Kamar Tahun 2023

Mahkamah Agung menyelenggarakan pleno kamar tahunan tahun 2023 pada tanggal 19–21 November 2023 menghasilkan 29 rumusan hukum. Rumusan tersebut diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023. Dari 29 rumusan hukum rapat pleno kamar tersebut, sebanyak 25

rumusan hukum merupakan kaidah hukum baru. Sisanya terbagi ke dalam rumusan hukum yang menyempurnakan kesepakatan kamar sebelumnya sebanyak dua kaidah hukum, mencabut kesepakatan kamar sebanyak dua kaidah hukum, dan mengubah kesepakatan kamar sebelumnya sebanyak satu kaidah hukum.

Sepanjang dua belas penyelenggaraan rapat pleno kamar tahunan selama periode 2012–2023 telah dihasilkan sebanyak 519 rumusan hukum.

PEMBARUAN BIDANG MANAJEMEN PERKARA

Arah pembaruan bidang manajemen perkara adalah mewujudkan misi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Pembaruan bidang manajemen perkara merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa badan peradilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Program pembaruan di bidang manajemen perkara sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Penyempurnaan Informasi Amar Putusan Kasasi/Peninjauan Kembali pada Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung

Publikasi amar putusan melalui media yang mudah diakses publik telah memenuhi aspek keterbukaan informasi. Akan tetapi, publik masih penasaran dengan amar kabul dan tolak perbaikan.

Kepaniteraan Mahkamah Agung merespons hal tersebut dengan memberlakukan kebijakan penyempurnaan informasi amar putusan tolak perbaikan dan kabul. Kebijakan tersebut tertuang dalam memorandum Panitera Mahkamah Agung Nomor 3594/PAN/KU.01/12/2022 tanggal 30 Desember 2022. Memorandum tersebut berisi instruksi untuk menyempurnakan informasi *amar putusan kabul* dan *amar putusan tolak perbaikan* pada Sistem Info Perkara MA yang berlaku mulai 2 Januari 2023. Amar

putusan kabul harus disertai informasi lebih terperinci terkait batalnya putusan yang diajukan upaya hukum. Amar putusan tolak perbaikan harus disertai informasi bagian amar putusan yang diperbaiki oleh Mahkamah Agung.

Penyelenggaraan Sidang Pengucapan Putusan secara Terbuka melalui Sarana Teknologi Informasi

Dorongan agar publik bisa mengakses sidang pengucapan putusan semakin menguat setelah terjadi peristiwa pelanggaran pidana oleh oknum aparaturnya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merespons hal tersebut dengan menggagas penyelenggaraan sidang pengucapan putusan secara terbuka melalui sarana teknologi informasi. Mahkamah Agung telah menyusun tata cara persidangan pengucapan putusan kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Mahkamah Agung telah membangun kanal khusus dalam aplikasi berbagi video (<https://www.youtube.com/@mahkamahagungtv>). Kanal khusus tersebut terintegrasi dengan aplikasi *live streaming* pengucapan amar putusan kasasi dan peninjauan kembali yang dapat diakses melalui laman <https://court-live.mahkamahagung.go.id/>.

Pemanfaatan Teknologi Robotika dalam Penunjukan Majelis Hakim

Sejalan dengan agenda penataan ulang proses manajemen perkara, Mahkamah Agung membangun aplikasi Smart Majelis. Sistem aplikasi yang berbasis teknologi kecerdasan buatan ini merupakan sistem pendukung pengambilan keputusan (*decision support system*) bagi Ketua Mahkamah Agung dan/atau Ketua Kamar dalam menentukan majelis hakim. Sistem kecerdasan buatan yang ditanamkan dalam aplikasi Smart Majelis dapat menentukan majelis hakim dengan mempertimbangkan statistik distribusi beban kerja, klasifikasi dan kompleksitas perkara, spesialisasi keahlian para hakim agung, ataupunantisipasi terjadinya benturan kepentingan serta aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan majelis hakim.

Penguatan Kerja Sama Kelembagaan untuk Pengimplementasian Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli yang Berkediaman di Luar Negeri secara Elektronik

Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri telah melakukan kerja sama kelembagaan untuk penanganan permintaan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara sejak tahun 2013. Dalam nota kesepahaman periode 2023--2028, Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri sepakat memasukkan materi muatan yang belum dimuat dalam nota kesepahaman tahun 2013 dan 2018. Materi muatan baru tersebut terkait dengan pemeriksaan secara elektronik saksi dan/atau ahli yang berkediaman di luar negeri dan penyampaian bantuan teknis hukum secara elektronik. Dengan adanya MoU ini, pengadilan elektronik Indonesia dapat juga diselenggarakan lintas negara.

Materi kesepakatan baru tersebut dimuat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Nota Kesepahaman Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung Nomor PRJ/HK/00001/04/2023/22 tanggal 11 April 2023 dan Nomor 02/KMA/NK/IV/2023 tanggal 6 April 2023. Pasal 6 Nota Kesepahaman tersebut menetapkan kantor perwakilan dapat melakukan pemeriksaan saksi dan/atau ahli selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum negara setempat. Segala biaya yang timbul dari pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara elektronik dibebankan kepada pihak berperkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pasal 7 Nota Kesepahaman menentukan penyampaian surat *rogatory* dan bantuan penyampaian dokumen dapat dilakukan secara elektronik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan negara tujuan.

Penguatan Modernisasi Manajemen Perkara melalui Perluasan Pelayanan Hukum Terintegrasi

Untuk memperluas integrasi layanan administrasi perkara pidana di lingkungan peradilan militer, termasuk penanganan perkara koneksitas, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 6 November 2023 tentang Administrasi Berkas Perkara Berbasis Sistem Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Perkara Koneksitas di Lingkungan Peradilan Militer. Upaya percepatan implementasi e-Berpadu di lingkungan peradilan militer ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Edaran Dirjen Badilmiltun Nomor 21 Tahun 2023 tanggal 23 November 2023 tentang Implementasi e-Berpadu dan Permintaan Data Admin e-Berpadu di Lingkungan Peradilan Militer Tahun 2023. Selain itu, dilakukan juga sosialisasi secara daring kepada pengadilan militer di seluruh Indonesia oleh Biro Hukum dan Humas MA pada tanggal 12 Desember 2023.

Peningkatan Kemudahan Akses terhadap Informasi Putusan untuk Mendorong Konsistensi Putusan

Jumlah putusan yang tersedia pada Direktori Putusan per 31 Desember 2023 sebanyak 8.432.187 putusan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 891.489 putusan dipublikasikan sepanjang tahun 2023. Rerata publikasi putusan per bulan pada tahun 2023 sebanyak 74.291 putusan. Data perincian publikasi putusan sepanjang tahun 2023 berdasarkan lingkungan peradilan tampak sebagaimana tabel berikut.

Mahkamah Agung juga telah meningkatkan kemudahan akses Direktori Putusan dengan menyediakan berbagai pilihan akses gawai, yaitu desktop dan mobile, baik untuk pengguna android maupun IOS.

KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

Gambaran Umum Penanganan Perkara Di Seluruh Indonesia Tahun 2023

Keadaan perkara pada Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan, dan pengadilan pajak adalah sebagai berikut.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2023

Peradilan	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Cabut	Sisa 2023	% Penyelesaian
Mahkamah Agung	260	27.252	27.512	27.365	0	147	99,47%
Pengadilan Tk. Banding	2.948	27.572	30.520	27.609	20	2.891	90,53%
Pengadilan Tk. Pertama	59.711	2.786.073	2.845.784	2.724.345	57.507	63.932	97,75%
Pengadilan Pajak	11.580	15.098	26.678	16.223	0	10.455	60,81%
Jumlah	74.499	2.855.995	2.930.494	2.795.542	57.527	77.425	97,36%

Perkara yang diterima badan peradilan Indonesia tahun 2023 berkurang 19,93% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima sebanyak 3.567.031 perkara. Jumlah beban perkara berkurang 20,05% daripada tahun 2022 yang berjumlah 3.643.161 perkara. Jumlah perkara yang diputus juga berkurang 20,91% daripada tahun 2022 yang berjumlah 3.513.605 perkara. Jumlah sisa perkara meningkat 7,09 dari tahun 2022 yang berjumlah 74.446 perkara. Berkurangnya produktivitas memutus tersebut bukan indikator berkurangnya kinerja penanganan perkara, melainkan sebagai dampak dari berkurangnya beban perkara tahun 2023. Hal itu terbukti dengan rasio produktivitas memutus perkara yang mencapai 97,36%.

Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2023

Lingkungan Peradilan	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Cabut	Sisa 2023	% Penyelesaian
Peradilan Umum	37.766	2.177.566	2.215.332	2.168.697	5.899	40.736	98,16%
Peradilan Agama	20.801	603.512	624.313	551.108	51.061	22.144	96,45%
Peradilan Militer	251	2.382	2.633	2.405	2	226	91,42%
Peradilan TUN	893	2.613	3.506	2.135	545	826	76,44%
Jumlah	59.711	2.786.073	2.845.784	2.724.345	57.507	63.932	97,75%

Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2023

Lingkungan Peradilan	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Cabut	Sisa 2023	% Penyelesaian
Peradilan Umum	2.685	22.852	25.537	23.010	0	2.527	90,10%
Peradilan Agama	30	2.835	2.865	2.835	2	28	99,02%
Peradilan Militer	35	537	572	526	4	42	92,66%
Peradilan TUN	198	1.348	1.546	1.238	14	294	80,98%
Pengadilan Pajak	11.580	15.098	26.678	16.223	0	10.455	60,81%
Jumlah	14.528	42.670	57.198	43.832	20	13.346	76,67%

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan

Lingkungan Peradilan	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Cabut	Sisa 2023	% Putus
Mahkamah Agung	260	27.252	27.512	27.365	0	147	99,47%
Peradilan Umum	40.451	2.200.418	2.240.869	2.191.707	5.899	43263	98,07%
Peradilan Agama	20.831	606.347	627.178	553.943	51.063	22172	96,46%
Peradilan Militer	286	2.919	3.205	2.931	6	268	91,64%
Peradilan TUN	1.091	3.961	5.052	3.373	559	1120	77,83%
Pengadilan Pajak	11.580	15.098	26.678	16.223	0	10455	60,81%
Jumlah	74.499	2.855.995	2.930.494	2.795.542	57.527	77.425	97,36%

GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG

Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung

Mahkamah Agung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam melaksanakan kewenangan di bidang penanganan perkara, yaitu sebagai berikut.

No.	IKU Penanganan Perkara MA	Keterangan
1.	Rasio produktivitas memutus (<i>case-deciding productivity rate</i>) di atas 70% dari beban perkara.	Rasio produktivitas memutus adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dan jumlah beban perkara pada satu periode.
2.	Rasio penyelesaian perkara (<i>clearance rate</i>) di atas 100%.	Rasio penyelesaian perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar dalam satu periode atau perbandingan jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung.
3.	70 persen perkara diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (<i>on time case processing</i>).	Jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 adalah 250 hari. Waktu memutus perkara ditetapkan maksimal selama 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima majelis hakim, sedangkan waktu minutası adalah 3 (tiga) bulan sejak perkara diputus.
4.	Berkurangnya persentase perkara tunggakan dari keseluruhan perkara aktif (<i>case backlog</i>).	Tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara.

Gambaran Umum Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2023

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2023 berdasarkan Jenis Perkara

Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023	Rasio Produktivitas
Perdata	26	6.202	6.228	6.138	90	98,55%
Perdata khusus	0	1.458	1.458	1.454	4	99,73%
Pidana	2	1.698	1.700	1.700	0	100%
Pidana khusus	25	8.033	8.058	8.047	11	99,86%
Perdata agama/jinayah	0	1.646	1.646	1.646	0	100%
Pidana militer	0	443	443	443	0	100%
Tata usaha negara	207	7.772	7.979	7.937	42	99,47%
Jumlah	260	27.252	27.512	27.365	147	99,47%

Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2023 berkurang 3,05% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 28.109 perkara. Beban penanganan perkara berkurang 2,73% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 28.284 perkara. Perkara yang diputus berkurang 2,35 % jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 28.024 perkara. Berkurangnya produktivitas memutus perkara bukan indikasi menurunnya kinerja, melainkan sebagai akibat dari menurunnya beban perkara. Penanganan perkara Mahkamah Agung menunjukkan kinerja yang positif. Rasio produktivitas memutus perkara sebesar 99,47% yang meningkat 0,39% daripada tahun 2022 yang berjumlah 99,08%.

Rasio produktivitas memutus perkara tahun 2023 berada 29,47% di atas target penyelesaian perkara yang ditetapkan sebesar 70%. Jumlah perkara yang belum diputus berkurang 43,46% dari 260 perkara pada tahun 2022 menjadi 147 perkara.

Sisa perkara tahun 2023 merupakan jumlah yang terkecil dalam sejarah Mahkamah Agung .

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kewenangan

No.	Jenis Kewenangan	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
A	Perkara					
1.	Kasasi	45	16.719	16.764	16.699	65
2.	Peninjauan kembali	56	3.501	3.557	3.517	40
3.	Peninjauan kembali perkara pajak	147	6.926	7.073	7.034	39
4.	Grasi	5	52	57	57	0
5.	Hak uji materiel (PPU)	7	52	59	56	3
6.	Permohonan uji pendapat	0	1	1	1	0
7.	Pelanggaran administrasi pemilihan	0	0	0	0	0
8.	Sengketa kewenangan mengadili	0	1	1	1	0
	Jumlah	260	27.25	27.512	27.365	147
B	Nonperkara					

Tabel Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Jumlah Masuk	Jumlah Kirim	%
1.	Perdata	6.202	6.091	98,21%
2.	Perdata khusus	1.458	1.615	110,77%
3.	Pidana	1.698	1.948	114,72%
4.	Pidana khusus	8.033	9.588	119,36%
5.	Perdata agama/jinayah	1.646	1.665	101,15%
6.	Pidana militer	443	482	108,80%
7.	Tata usaha negara	7.772	7.033	90,49%
	Jumlah	27.252	28.422	104,29%

Tabel Perkara Belum Minutasi pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Belum Minutasi	Status Usia Perkara Belum Minutasi			
			di atas 3 bulan (tunggakan)	%	di bawah 3 bulan (bukan tunggakan)	%
1.	Perdata	1410	63	4,47%	1347	95,53%
2.	Perdata khusus	80	0	0,00%	80	100,00%
3.	Pidana	287	102	35,54%	185	64,46%
4.	Pidana khusus	1316	382	29,03%	934	70,97%
5.	Perdata agama	155	0	0,00%	155	100,00%
6.	Pidana militer	20	3	15,00%	17	85,00%
7.	Tata usaha negara	1323	10	0,76%	1313	99,24%
	Jumlah	4591	560	12,20%	4031	87,80%

Tabel Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2023

No.	Kategori	Tahun 2022	Tahun 2023	Perbandingan 2022--2023
1.	Belum putus	260	147	-43,5%
2.	Sudah putus belum minutasi	5.099	4591	-10,0%
3.	Sudah minutasi belum kirim	0	0	0,0%
		5.359	4.738	-11,6%

Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Amar Putusan					Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No.	Pencabutan	
1.	Perdata	554	3.705	527	3	12	4.801
2.	Perdata khusus	204	824	355	5	1	1.389
3.	Pidana	204	1.119	174	11	1	1.509
4.	Pidana khusus	587	3.370	2.617	16	3	6.593
5.	Perdata agama/jinayah	217	829	240	69	4	1.359
6.	Pidana militer	13	314	59	27	1	414
7.	Tata usaha negara	96	464	16	11	5	592
	Jumlah	1.875	10.625	3.988	142	27	16.657
	%	11,26 %	63,79 %	23,94 %	0,85 %	0,16 %	

Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Amar Putusan						Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No.	Pencabutan	Putusan Sela	
1.	Perdata	130	1.184	0	10	12	0	1.336
2.	Perdata khusus	8	54	0	3	0	0	65
3.	Pidana	15	165	0	1	1	1	183
4.	Pidana khusus	418	982	0	6	0	0	1.406
5.	Perdata agama/jinayah	25	191	0	25	0	0	241
6.	Pidana militer	7	21	0	0	0	0	28
7.	Tata usaha egara	33	203	1	16	1	0	254
8.	Pajak	611	6.340	0	69	1	12	7.034
Jumlah		1.247	9144	1	130	15	13	10.551
%		11,82 %	86,67 %	0,01 %	1,23 %	0,14 %	0,13 %	

Tabel Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2023

No.	Pemohon	Pidana Umum		Pidana Khusus		Pidana Militer		Keterangan
		Kasasi	%	Kasasi	%	Kasasi	%	
1.	Terdakwa	275	18,24 %	2.485	37,77 %	183	44,20 %	
2.	Jaksa/Oditur	930	61,67%	2.462	37,42%	202	48,79 %	
3.	Terdakwa dan Jaksa/Oditur	303	20,09 %	1.632	24,81 %	29	7,00 %	
Jumlah		1.508		6.579		414		

Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2023

Pencapaian kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung Tahun 2023 dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut.

- 1) Rasio jumlah perkara yang telah diputus dengan jumlah beban perkara (rasio produktivitas memutus perkara) tahun 2023 sebesar 99,47%. Capaian tersebut 29,47% melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 70%. Selama 4 (empat) tahun berturut-turut, Mahkamah Agung berhasil mempertahankan rasio produktivitas memutus perkara di atas 99%. Perkara yang belum diputus pada akhir tahun kurang dari 1% beban perkara yang diterima.
- 2) Jumlah perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on time case processing*) sebanyak 27.060 dari 27.365 perkara atau 98,89%. Ketepatan waktu memutus tersebut berkurang 0,37% dari capaian tahun 2022 yang berjumlah 99,26%.
- 3) Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 25.672 dari 28.422 perkara (90,32%). Ketepatan waktu minutasi itu meningkat 24,98% dari capaian tahun 2022 yang berjumlah 65,34% (20.544 perkara).
- 4) Tunggakan minutasi perkara dapat direduksi sebesar 36,80% dari tunggakan akhir tahun 2022 sebesar 19,30% (984 perkara) menjadi sebesar 12,20% (560 perkara) pada akhir tahun 2023.
- 5) Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 104,29 %.

Keadaan Perkara dan Permohonan Lainnya di Luar Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali

Permohonan Grasi

Tabel Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2023

Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jml Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa 2023	% Penyelesaian
Pidana Umum	1	7	8	8	0	100%
Pidana Khusus	4	44	48	48	0	100%
Pidana Militer	0	1	1	1	0	100%
Jumlah	5	52	57	57	0	100%

Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU)

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiel Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Peraturan Menteri	2	17	19	18	1
2.	Peraturan Pemerintah	1	8	9	8	1
3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum	1	7	8	8	0
4.	Peraturan Daerah	0	5	5	4	1
5.	Peraturan Gubernur	0	4	4	4	0
6.	Peraturan Presiden	1	2	3	3	0
7.	Intruksi dan Keputusan Presiden	0	1	1	1	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
8.	Keputusan Presiden	0	1	1	1	0
9.	Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan	0	1	1	1	0
10.	Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia	1	1	2	2	0
11.	Peraturan Mahkamah Agung	1	1	2	2	0
12.	Peraturan Mahkamah Konstitusi	0	1	1	1	0
13.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	0	1	1	1	0
14.	Peraturan Walikota	0	1	1	1	0
15.	Putusan Mahkamah Agung	0	1	1	1	0
	Jumlah	7	52	59	56	3

Permohonan Fatwa

No.	Lembaga	Jumlah
1.	Kejaksaan RI	5
2.	Badan Pertanahan Nasional	3
3.	Pemerintah Provinsi	3
4.	Komisi Pemberantasan Korupsi RI	2
5.	Badan Pemeriksa Keuangan RI	1
6.	Kementerian Dalam Negeri	1
7.	Komisi Pemilihan Umum RI	1
8.	Ombudsman RI	1
9.	Pemerintah Kabupaten/Kota	1
	Jumlah	18

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING

Tabel Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2023

Lingkungan Peradilan	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Cabut	Sisa 2023	% Penyelesaian
Peradilan Umum	2.685	22.852	25.537	23.010	0	2.527	90,10%
Peradilan Agama	30	2.835	2.865	2.835	2	28	99,02%
Peradilan Militer	35	537	572	526	4	42	92,66%
Peradilan TUN	198	1.348	1.546	1.238	14	294	80,98%
Pengadilan Pajak	11.580	15.098	26.678	16.223	0	10.455	60,81%
Jumlah	14.528	42.670	57.198	43.832	20	13.346	76,67%

Jumlah perkara yang diterima pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan dan pengadilan pajak tahun 2023 meningkat 4,91% daripada tahun 2022 yang menerima sebanyak 40.674 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 7,47% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 40.784 perkara. Jumlah sisa perkara berkurang 7,88% dari tahun 2022 yang berjumlah 14.488 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan pajak sebesar 76,67% meningkat 3,87% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah sebesar 73,81%. Rasio produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding di luar pengadilan pajak sebesar 90,46% meningkat 0,86% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 89,69%.

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2023

Lingkungan Peradilan	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Cabut	Sisa 2023	% Penyelesaian
Peradilan Umum	37.766	2.177.566	2.215.332	2.168.697	5.899	40.736	98,16%
Peradilan Agama	20.801	603.512	624.313	551.108	51.061	22.144	96,45%
Peradilan Militer	251	2.382	2.633	2.405	2	226	91,42%
Peradilan TUN	893	2.613	3.506	2.135	545	826	76,44%
Jumlah	59.711	2.786.073	2.845.784	2.724.345	57.507	63.932	97,75%

Jumlah perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan tahun 2023 berkurang 20,36% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima sebanyak 3.498.355 perkara. Jumlah beban perkara berkurang 20,05% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 3.559.665 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 20,91% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 3.444.803 perkara. Jumlah sisa perkara meningkat 7,07% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 59.711 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada pengadilan tingkat pertama berkurang 0,58% dari 98,32% pada tahun 2022 menjadi 97,75%.

Jumlah putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan upaya hukum banding sebanyak 19.223 perkara dan yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 1.088 perkara.

KINERJA PENANGANAN PERKARA MELALUI LAYANAN PENGADILAN ELEKTRONIK

No.	Badan Peradilan	2020	2021	2022	2023	% kenaikan
1.	Pengadilan negeri	82.225	90.041	102.654	125.660	22,41%
2.	Pengadilan agama	102.690	132.869	177.769	185.629	4,42%
3.	Pengadilan tata usaha negara	2072	2.162	2.760	2.658	-3,70%
Jumlah		186.987	225.071	283.183	313.947	10,86%

Perkara yang didaftarkan melalui *e-court* dan berlanjut ke persidangan elektronik berjumlah 311.615 perkara atau 99,26%. Rasio penyelenggaraan persidangan elektronik meningkat 89,34% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 9,92%. Grafik pertumbuhan penyelenggaraan persidangan elektronik tampak pada grafik berikut.

Pengguna layanan sistem peradilan elektronik pada tahun 2023 sebanyak 313.321 terdiri atas pengguna terdaftar sebanyak 187.846 (59,95%) dan pengguna lainnya sebanyak 125.475 (40,05%). Jumlah tersebut meningkat sebesar 10,59% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 283.314.

Data perkara yang diselesaikan dengan persidangan elektronik pada setiap lingkungan peradilan adalah sebagaimana tabel berikut.

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara		% e-litigasi	Kualifikasi				
		e-court	e-litigasi		Pengguna layanan	Pengguna Terdaftar	%	Pengguna Lainnya	%
1.	Pengadilan negeri	125.660	124.234	99,98%	125.271	53.958	43,07%	71.313	56,93%
2.	Pengadilan agama	185.629	184.747	99,52%	185.409	131.435	70,89%	53.974	29,11%
3.	Pengadilan TUN	2.658	2.634	99,10%	2.641	2.453	92,88%	188	7,12%
Jumlah		313.947	311.615	99,26%	313.321	187.846	59,95%	125.475	40,05%

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Perdata	Jumlah Perkara e-Court	Rasio Perkara e-Court
1.	Pengadilan negeri	126.096	125.660	99,65%
2.	Pengadilan agama	603.101	185.629	30,78%
3.	Pengadilan TUN	2.658	2.658	100,00%
Jumlah		761.538	731.855	313.947

Layanan Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan TUN pada Pengadilan Tingkat Banding

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara e-Court yang terdaftar	Jumlah Perkara e-Court yang telah diputus	Sisa Perkara
1.	Peradilan umum	4.382	3.111	1.271
2.	Peradilan agama	911	708	203
3.	Peradilan tata usaha negara	1.351	866	485
Jumlah		6.644	4.685	1.959

Pengguna Layanan e-court

No	Jenis Pengguna	2022	2023	Jumlah
1	Pengguna terdaftar	52.135	187.849	239.984
2	Pengguna lainnya	229.357	125.475	354.832
Jumlah		203.109	315.347	594.816

AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN

AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2023

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum		Agama		Militer	TUN	Jumlah
	Perdata	Pidana	Perdata Agama	Jinayah			
Jumlah perkara diputus pengadilan tingkat pertama	42.999	124.250	432.089	371	2.129	2.098	560.937
Jumlah perkara banding	8.349	14.503	2.779	56	537	1.348	19223
Rasio upaya hukum banding	19,42%	11,67%	0,64%	15,09%	25,22%	64,25%	3,43%
Tingkat akseptabilitas putusan tingkat pertama	80,58%	88,33%	99,36%	84,91%	74,78%	35,75%	96,57%

Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum			Agama		Militer	TUN	Jumlah
	Perdata Khusus	Perdata	Pidana	Perdata Agama	Jinayah			
Jumlah perkara yang diputus pada pengadilan khusus dan pengadilan banding	2.766	8.316	14.694	2.779	56	526	1.238	30375
Jumlah permohonan kasasi	1391	4858	8087	1359	42	414	568	16719
Rasio upaya hukum kasasi	50,29%	58,42%	55,04%	48,90%	75,00%	78,71%	45,88%	55,04%
Tingkat akseptabilitas putusan banding	49,71%	41,58%	44,96%	51,10%	25,00%	21,29%	54,12%	44,96%

Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2023

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Perdata Khusus	Perdata	Pidana	Pidana Khusus	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi	1389	4801	1509	6593	1401	414	592	16699
Jumlah putusan kasasi yang diajukan permohonan upaya hukum peninjauan kembali	52	1109	119	423	156	23	158	2040
Rasio upaya hukum peninjauan kembali	3,74%	23,10%	7,89%	6,42%	11,13%	5,56%	26,69%	12,22%
Tingkat akseptabilitas putusan kasasi	96,26%	76,90%	92,11%	93,58%	88,87%	94,44%	73,31%	87,78%

Perkara yang diajukan Peninjauan Kembali

Tabel Data Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2023

No.	Jenis Permohonan	Jml	Putusan BHT Yang Diajukan PK			
			PK	KASASI	BANDING	PERTAMA
1.	Perdata	1.343	45	1109	124	65
2.	Perdata khusus	67	1	52	0	14
3.	Pidana	183	2	119	13	49
4.	Pidana khusus	1.410	19	423	129	839
5.	Perdata agama	241	4	153	20	64
6.	Jinayah	4	0	3	1	0
7.	Pidana militer	28	0	23	1	4
8.	Tata usaha negara	225	9	158	5	53
	Jumlah	3.501	80	2040	293	1088
	Persentase		2,29%	58,27%	8,37%	31,08%
	Pajak	6.926	13	0	0	6913
	Jumlah	10.427	93	2.040	293	8.001

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Sepanjang tahun 2023, pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara menerima permohonan eksekusi sebanyak 4.543 perkara. Jumlah putusan yang dieksekusi selama tahun 2023 sebanyak 3.530 perkara.

PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI DAN DIVERSI

Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

Tabel Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2023

No.	Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
1.	Pengadilan Negeri	41.198	1.509	16.893	21.530	1.266
			3,66%	41,00%	52,26%	3,07%
2.	Pengadilan Agama	63.312	25.230	35.984	1262	836
			39,85%	56,84%	1,99%	1,32%
Jumlah		104.510	26.739	52.877	22.792	2.102
Persentase			25,59%	50,60%	21,81%	2,01%

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI

Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi pada Pengadilan Negeri

Periode	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	%	Status Keberhasilan					
				Berhasil	%	tidak berhasil	%	Dalam Proses	%
2021	5178	142	2,74%	30	21,13%	19	13,38%	93	65,49%
2022	5533	67	1,21%	27	40,30%	35	52,24%	5	7,46%
2023	5190	657	12,66%	464	70,62%	189	28,77%	4	0,61%

Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi pada Mahkamah Syar'iyah

Periode	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	%	Status Keberhasilan					
				Berhasil	%	tidak berhasil	%	Dalam Proses	%
2021	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2022	2	2	100%	0	0%	2	100%	0	0%
2023	38	38	100%	1	2,63%	37	97,37%	0	0%

PENANGANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA KE LUAR NEGERI

No.	Pengadilan	Jumlah Pengadilan	Jenis Dokumen		Jumlah Pgl/Pbt	Jml Negara
			Panggilan	Pemberi-tahuan		
1.	Pengadilan Negeri	30	336	93	429	43
2.	Pengadilan Agama	42	95	58	153	33
Jumlah		72	431	151	582	

RASIO BEBAN DAN KINERJA PENANGANAN PERKARA

RASIO BEBAN PENANGANAN PERKARA DENGAN JUMLAH HAKIM

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2023

No.	Rasio Beban Kerja	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1.	Jumlah beban perkara tingkat pertama	2.215.332	624.313	2.633	3.506		2.845.784
	Jumlah hakim	3333	2346	115	275		6.069
	Rasio hakim dengan jumlah perkara	1:665	1:266	1:23	1:113		1:469
	Rata-rata beban tiap hakim	1:1994	1:798	1:69	1:38		1:1407
2.	Jumlah beban perkara tingkat banding	25.537	2.865	572	1.546	26.678	57.198
	Jumlah hakim	722	405	32	55	72	1.286
	Rasio hakim dengan jumlah perkara	1:35	1:7	1:18	1:28	1:371	1:44
	Rata-rata beban tiap hakim	106	21	54	84	1112	133

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2023

Jumlah	Perdata	Pidana	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah beban perkara	7.686	9.758	1.646	443	7.979	27.512
Jumlah hakim agung	16	11	7	4	7	45
Rasio hakim agung dengan beban perkara	1: 480	1: 887	1:235	1: 111	1: 1.140	1: 611
Rerata beban kerja setiap hakim	1.441	2.661	705	332	3.420	1.834

RASIO KINERJA PENANGANAN PERKARA DENGAN JUMLAH HAKIM

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2023

No	Produktivitas	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1.	Perkara diputus pengadilan tingkat pertama	2.168.697	551.108	2.405	2.135		2.724.345
	Jumlah hakim	3333	2346	115	275		6.069
	Rasio	1: 651	1: 235	1: 21	1: 8		1: 914
	Rata-rata produktivitas tiap hakim	1952	705	63	23		2743
2.	Perkara putus pengadilan tingkat banding	23.010	2.835	526	1.238	16.223	43.832
	Hakim	722	405	32	55	72	1.286
	Rasio	1: 32	1: 7	1: 16	1: 23	1: 225	1: 34
	Rata-rata produktivitas tiap hakim	96	21	49	68	676	102

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Banding Tahun 2023

Jumlah	Perdata	Pidana	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah perkara putus	7.592	9.747	1.646	443	7.937	27.365
Jumlah hakim agung	16	11	7	4	7	45
Rasio hakim agung dengan perkara	1: 475	1: 886	1: 235	1: 111	1: 1.134	1: 608
Rerata produktivitas tiap hakim	1.424	2.658	705	332	3.402	1.824

KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

Kontribusi dari PNBP

Penerimaan negara bukan pajak dari layanan penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tergambar pada tabel berikut.

No	Akun		Realisasi (Rp)
1.	425231	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	219.310.000
2.	425232	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan peradilan	2.926.702.500
3.	425233	Pendapatan ongkos perkara	23.652.395.000
4.	425239	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	50.923.466.933
Jumlah			77.721.874.433

Potensi Kontribusi terhadap Keuangan Negara yang Berasal dari Uang Denda dan Uang Pengganti berdasarkan Putusan Perkara Pidana

Putusan Mahkamah Agung

No.	Jenis	Jumlah (Rp)
1.	Uang denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kekhutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dll.	7.765.826.387.713
2.	Uang pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, lingkungan hidup, dll.	53.641.719.746.840
Jumlah		61.407.546.134.553

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum

No.	Jenis	Jumlah (Rp)
1.	Uang Denda perkara Lalu lintas	201.958.248.958
2.	Uang Denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kekhutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dll	47.034.832.300.115
3.	Uang Pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, lingkungan hidup, dll	5.514.815.433.071
Jumlah		52.751.605.982.144

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer

No.	Klasifikasi	Jumlah Perkara	Jumlah Denda	Uang Pengganti	Jumlah (Rp)
1.	Kejahatan	2.189	40.405.210.000	219.729.064.412	260.134.274.412
2.	Pelanggaran	276	55.967.500		55.967.500
Jumlah		2.465	40.461.177.500	219.729.064.412	260.190.241.912

Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Biaya Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

No.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1.	Saldo Awal Tahun 2023	28.224.981.016	
2.	Penerimaan Tahun 2023	23.034.336.998	
3.	Penggunaan Biaya Proses 2023		24.889.123.108
4.	Saldo Akhir 2023		26.370.194.906
	Jumlah	51.259.318.014	51.259.318.014

Kategori	Periode Pembayaran				
	2019	2020	2021	2022	2023
Total penerimaan biaya perkara	21.574.552.689	17.906.015.000	19.356.920.000	24.481.827.200	23.034.336.998
Jumlah biaya perkara dikirim menggunakan VA	17.426.500.000	16.637.000.000	16.637.500.000	20.966.500.000	17.577.000.000
Persentase pembayaran menggunakan VA	80,77%	92,91%	85,95%	85,64%	76,31%

Biaya Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

No.	Jenis Perkara	Jumlah perkara	Biaya Proses	Jumlah (Rp)
1.	Peradilan Umum (Perdata)	8349	150.000	Rp 1.252.350.000
2.	Peradilan Agama (Perdata)	2779	150.000	Rp 416.850.000
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	1348	250.000	Rp 337.000.000
	Jumlah			Rp 2.006.200.000



Bab 2

Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap Keadilan

REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG

PROGRAM PEMBARUAN

Memasuki tahapan sasaran lima tahun ketiga (2020-2024) dari *grand design* reformasi birokrasi nasional, Mahkamah Agung melakukan peningkatan kapasitas birokrasi melalui langkah-langkah yang sistematis dan berkelanjutan demi mewujudkan birokrasi berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas serta tata kelola yang semakin efektif dan efisien melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Pimpinan Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai kebijakan demi kelancaran pelaksanaan layanan teknis dan nonteknis dengan mempertimbangkan asas efektivitas dan efisiensi kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sepanjang tahun 2023 Mahkamah Agung telah mengeluarkan banyak program, kebijakan, dan meraih berbagai prestasi dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi, yaitu sebagai berikut.

- a. Pembangunan inovasi digital untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu Smart Majelis dan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).
- b. Mahkamah Agung melakukan upaya penataan regulasi di dalam rangka penguatan reformasi hukum dengan menerbitkan tiga Peraturan Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut.
 - (1) Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;
 - (2) Perma Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan; dan

- (3) Perma Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan, dan Pembatalan Putusan Arbitrase.
- c. Pembangunan inovasi digital *Electronic Integrated Planning System* atau e-IPLANS.
 - d. Biro Perencanaan dan Organisasi pada Badan Urusan Administrasi dan Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Katadata Insight Center melakukan survei persepsi pemangku kepentingan eksternal terhadap capaian dan dampak pembaruan peradilan.
 - e. Peningkatan akreditasi Unit Penilaian Kompetensi (*Assessment Center*) Mahkamah Agung yang mendapat akreditasi B pada tahun 2021 menjadi akreditasi A pada tahun 2023.
 - f. Mahkamah Agung melakukan kerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia sebagai langkah dalam modernisasi administrasi perkara.
 - g. Mahkamah Agung bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan *paralegal academy*, yaitu program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kepala daerah dan lurah dalam menyelesaikan sengketa atau advokasi.
 - h. Penerbitan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta penerbitan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 627/SEK/SK/VII/2023 tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yang mengakomodasi ketentuan umum tentang penerapan secara elektronik dalam rangka penguatan tata kelola dan digitalisasi arsip di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
 - i. Perilisan film "Pesan Bermakna Jilid III" dilakukan untuk meningkatkan integritas dan profesionalitas para aparatur peradilan.
- Prestasi yang diraih Mahkamah Agung dan Jajaran di bawahnya pada tingkat nasional selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.
- Mahkamah Agung meraih predikat "Informatif" dalam Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 kategori lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian dengan nilai 94,95.
 - Meraih predikat opini *wajar tanpa pengecualian* (WTP) ke-11 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan atas kinerja laporan keuangan Mahkamah Agung.
 - Mahkamah Agung memperoleh kategori *Eka Acalapati* dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN) sebagai anggota JDIHN yang memperoleh nilai paling tinggi dalam pengelolaan JDIH dengan nilai 95,00.
 - Meraih penghargaan *Garuda Pelindung* dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
 - Meraih Penghargaan *Korpri Award* kategori *Life Time Achievement* dari Dewan Pengurus Nasional Korpri.
 - Mendapatkan predikat bintang 5 *Top Digital Award* untuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan *Top CIO on Digital Implementation 2023* bagi Sekretaris Ditjen, Badan Peradilan Agama.
 - Pengadilan Negeri Singaraja, Pengadilan Agama Yogyakarta, dan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin ditetapkan sebagai unit kerja penyelenggara pelayanan publik terbaik penyedia sarana prasarana ramah kelompok rentan.
 - Pengadilan Agama Cilegon berhasil meraih predikat Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima
 - Prestasi dalam pembangunan zona integritas adalah sebagai berikut.
 - (1) Pengadilan Agama Magelang ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023; dan
 - (2) 60 (Enam Puluh) Satuan Kerja pengadilan ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi.

- Tujuh unit kerja memenuhi standar untuk mendapatkan sertifikat SMAP.
- Mahkamah Agung mendapatkan penghargaan sebagai penyumbang pajak terbesar di KPP Pratama.

EVALUASI CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010--2035

Evaluasi terhadap capaian Cetak Biru 2010--2035 dilaksanakan oleh Tim Asistensi Pembaruan MA dan Biro Perencanaan dan Organisasi pada Badan Urusan Administrasi sejak bulan April hingga Desember 2023. Evaluasi Cetak Biru menghasilkan temuan dan rekomendasi yang telah dipresentasikan di hadapan Pimpinan MA dan para hakim agung dalam Rapat Pleno MA pada 20 November 2023.

No.	Area Cetak Biru	Capaian dan Tantangan	Rekomendasi
1.	Area visi misi dan organisasi	<p>a. Visi dan misi MA telah diketahui oleh anggota badan peradilan, tetapi perlu dilakukan internalisasi secara berkala dan sistematis untuk membangun budaya organisasi yang lebih baik.</p> <p>b. Proses restrukturisasi organisasi MA satu atap belum terlaksana secara utuh sehingga proses kerja organisasi yang efektif dan efisien belum sepenuhnya terlaksana.</p>	<p>(1) Melaksanakan proses internalisasi visi misi MA secara terstruktur melalui berbagai metode sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan serta membangun profil kepemimpinan di seluruh tingkatan badan peradilan.</p> <p>(2) Mendorong proses restrukturisasi organisasi MA secara menyeluruh melalui berbagai penyusunan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana di bawahnya.</p>
2.	Area fungsi teknis	<p>a. Penerapan sistem kamar dan penyusunan berbagai instrumen penguatan kesatuan hukum seperti SEMA kesepakatan kamar, publikasi kaidah yurisprudensi, penyusunan Perma untuk pedoman pemidanaan dan mengisi kekosongan hukum acara.</p> <p>b. Percepatan penanganan perkara dan pembacaan perkara serentak di MA pasca- diterapkannya sistem kamar.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dan manajemen perkara melalui modernisasi penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding melalui penerapan SIPP, e-court, e-litigasi. Namun, dalam praktik masih terdapat keengganan masyarakat mempergunakan layanan e-court.</p> <p>d. Telah terjadi integrasi pelayanan hukum: integrasi pelayanan hukum dengan penegak hukum lain dan sistem login tunggal advokat (e-Berpadu dan <i>data base</i> advokat tunggal).</p> <p>e. Peningkatan fasilitas dan sarana prasarana pelayanan publik melalui program PTSP serta peningkatan pelayanan bagi kelompok difabel, tetapi kualitas pelayanan substantif masih perlu terus ditingkatkan.</p> <p>f. Jumlah arus perkara sejak tahun 2010 hingga 2023 terus meningkat sehingga mengakibatkan tingginya beban perkara pada hakim agung. Pengajuan upaya hukum tertinggi diajukan oleh jaksa penuntut umum dan PK perkara pajak.</p> <p>g. Inkonsistensi putusan pada semua tingkatan peradilan masih terjadi dan kepastian hukum masih menjadi tantangan. MA dihadapkan pada persoalan kualitas pertimbangan hukum dan produktivitas penanganan perkara karena tingginya beban kerja.</p>	<p>(1) Melakukan upaya pembatasan perkara kasasi dan PK, baik melalui perubahan legislasi, koordinasi, dan dialog dengan lembaga terkait serta memperkuat fungsi pengadilan tingkat banding sebagai pengadilan terakhir.</p> <p>(2) Mendorong peningkatan konsistensi dan kualitas putusan di MA dari aspek pertimbangan hukum, antara lain melalui penyempurnaan format putusan, penyusunan panduan pemidanaan, dan evaluasi konsistensi putusan.</p> <p>(3) Melakukan upaya sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan SEMA kesepakatan kamar pada pengadilan tingkat pertama dan banding oleh Kamar Perkara untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas putusan.</p> <p>(4) Mendorong perubahan Kitab UU Hukum Acara Perdata untuk mendorong proses acara perdata yang efektif dan efisien, memberi payung hukum dalam modernisasi peradilan perdata, serta mendorong penguatan sistem eksekusi putusan.</p> <p>(5) Memperluas sosialisasi kepada masyarakat, pencari keadilan dan advokat tentang tujuan dan manfaat e-court.</p> <p>(6) Melakukan kajian dan mendorong optimalisasi prosedur gugatan sederhana dan pengadilan niaga untuk mendorong efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara perdata.</p> <p>(7) Meningkatkan kualitas dan kapasitas hakim dan aparat peradilan untuk memberikan pelayanan hukum inklusif, termasuk kepada perempuan, anak, dan kelompok penyandang disabilitas.</p> <p>(8) Terus melaksanakan modernisasi penanganan perkara dengan mengikuti percepatan dan dinamika teknologi dengan membangun <i>grand design</i> dan strategi yang terstruktur, meningkatkan kapasitas aparatur, membangun tata kelola IT, serta menyesuaikan struktur organisasi untuk fungsi penanganan perkara.</p>

No.	Area Cetak Biru	Capaian dan Tantangan	Rekomendasi
3.	Area fungsi pendukung	<p>a. Terjadi kekurangan jumlah hakim dan aparat peradilan di berbagai pengadilan disebabkan, antara lain, oleh terjadinya beberapa kali moratorium seleksi hakim dan ASN serta distribusi hakim yang belum merata.</p> <p>b. Sistem mutasi dan promosi hakim mengalami perbaikan, antara lain, karena dinilai lebih terbuka, menerapkan sistem <i>fit and proper</i> untuk pemilihan pimpinan pengadilan, serta mempertimbangkan kepentingan keluarga hakim. Namun, sistem mutasi dan promosi hakim perlu diperkuat untuk mendorong proses berbasis merit dengan menggunakan parameter objektif sesuai dengan standar kompetensi.</p> <p>c. Sistem manajemen hakim--termasuk seleksi calon hakim, remunerasi, dan sistem pembinaan karier--masih belum sepenuhnya meninggalkan pola manajemen ASN yang tidak sepenuhnya sesuai untuk hakim sehingga berpengaruh pada proses pembinaan dan pembentukan hakim secara komprehensif.</p> <p>d. Berbagai program diklat dinilai telah dilaksanakan secara berkelanjutan melalui program pendidikan calon hakim, program sertifikasi, program diklat peminatan, ataupun program diklat regional. Namun, sebaran peserta diklat dinilai belum merata serta belum tersedia diklat khusus untuk menduduki jabatan pimpinan pengadilan. Selain itu, program diklat bagi panitera, juru sita, dan aparatur pengadilan dinilai masih belum memadai dan perlu dikembangkan.</p> <p>e. MA mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan anggaran selama 11 tahun, tetapi kemandirian anggaran belum terwujud. Kapasitas perencana dan pengelola keuangan, baik pada tingkat MA maupun pada pengadilan tingkat pertama dan banding perlu terus ditingkatkan agar tercapai perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien.</p> <p>f. Pengalihan kepemilikan aset pasca-penyatuan atap kepada MA telah berjalan dengan baik, tetapi akurasi pencatatan aset perlu terus ditingkatkan serta perlu terus diupayakan penyediaan fasilitas rumah dinas dan gedung pengadilan yang terstandardisasi.</p> <p>g. Modernisasi berjalan cepat, tetapi belum diimbangi dengan sumber daya manusia dan sarana/prasarana yang cukup. Selain itu, masih terjadi tumpang tindih dalam penggunaan berbagai aplikasi ataupun sistem IT.</p>	<p>(1) Mendorong pembentukan payung hukum yang lebih komprehensif untuk mengatur manajemen hakim sebagai pejabat negara dengan mekanisme seleksi, remunerasi, dan pengembangan karier yang berkepastian dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip independensi hakim.</p> <p>(2) Memperkuat mekanisme promosi mutasi SDM pengadilan agar konsisten dengan SOP dan prinsip merit, salah satunya telah diterapkan dalam SK KMA No. 349/2022.</p> <p>(3) Melakukan pengembangan sistem karier yang memberikan insentif bagi pengembangan kompetensi bagi panitera dan juru sita.</p> <p>(4) Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dan terintegrasi dengan pengembangan karier hakim dan aparatur peradilan.</p> <p>(5) Mengembangkan program diklat kepaniteraan dan jurusita sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi dan perkembangan modernisasi pengadilan.</p> <p>(6) Mendorong penyusunan kebijakan yang menjamin kecukupan dan kemandirian anggaran pengadilan; menyempurnakan mekanisme pengusulan, pembahasan, dan perubahan anggaran; serta meningkatkan kapasitas pelaksana fungsi perencanaan, penganggaran, dan keuangan.</p> <p>(7) Memperkuat sistem dan mekanisme pengelolaan aset meliputi: pencatatan aset, mekanisme pengadaan, pengelolaan dan penghapusan aset, serta administrasi aset berupa tanah dan bangunan.</p> <p>(8) Melaksanakan evaluasi atas berbagai sistem dan aplikasi berbasis elektronik dan teknologi informasi dari sisi pemanfaatan dan efisiensi serta peluang integrasi dalam meningkatkan keterhubungan dan pemanfaatan data.</p>

No.	Area Cetak Biru	Capaian dan Tantangan	Rekomendasi
4.	Area fungsi akuntabilitas	<p>a. Kinerja Badan Pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan sangat baik jika dilihat dari jumlah tindak lanjut pengaduan dan rekomendasi hukuman disiplin yang dijatuhkan MA. Namun, sumber daya yang dimiliki Badan Pengawasan belum dapat menjangkau jumlah hakim, panitera dan aparat peradilan, serta ruang lingkup pengawasan peradilan yang luas.</p> <p>b. Struktur organisasi Badan Pengawasan perlu disempurnakan untuk memperkuat independensi pelaksanaan fungsi pengawasan.</p> <p>c. Fungsi pengawasan melekat dan pengawasan oleh pengadilan tingkat banding masih perlu terus diperkuat.</p> <p>d. Kemajuan dalam keterbukaan informasi di pengadilan sangat pesat. Akses masyarakat terhadap informasi putusan dan informasi pengadilan lainnya sudah terbuka sesuai dengan SK KMA tentang Keterbukaan Informasi No. 144/2007 dan perubahannya pada tahun 2011 dan 2022.</p>	<p>(1) Mendorong restrukturisasi organisasi, termasuk Badan Pengawasan agar bertanggung jawab langsung kepada pimpinan MA untuk memperkuat independensi Badan Pengawasan.</p> <p>(2) Mendorong desentralisasi pelaksanaan fungsi pengawasan dengan memperkuat sumber daya dan pelaksana fungsi pengawasan pada pengadilan tingkat banding serta meningkatkan kapasitas hakim pengawas bidang dan hakim pengawas daerah pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.</p> <p>(3) Mengembangkan prosedur dan tata kerja pengawasan, antara lain, dengan mengakomodasi penggunaan hasil analisis LHKPN dan LHKASN dalam pengisian jabatan strategis serta memperkuat mekanisme <i>whistleblower</i> di Mahkamah Agung.</p> <p>(4) Melakukan evaluasi pelaksanaan SK KMA tentang keterbukaan informasi dan penyesuaian dengan berbagai UU yang relevan, antara lain UU Perlindungan Data Pribadi.</p>

AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM PEMBARUAN

Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif

Pada semester pertama tahun 2023, Rancangan Perma tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif telah berhasil dirampungkan oleh pokja untuk selanjutnya dibahas dan diputuskan dalam Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI.

Penguatan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Pada akhir 2023, Tim Perumus dalam Pokja Akses Keadilan yang dikoordinatori oleh SAPDA telah menuntaskan rancangan Perma tentang Pedoman Mengadili Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum. Rancangan Perma itu akan dibahas pada tingkat pokja dan dikonsultasikan kepada publik untuk dibahas dan diputuskan dalam Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI.

Dukungan Mahkamah Agung terhadap Prioritas Nasional Kemudahan Berusaha 2023

Dalam rangka mencermati perkembangan yang ada serta guna memastikan efektivitas koordinasi dan proses kerja terkait penguatan kemudahan berusaha, perumusan inisiatif dan perencanaan, serta implementasi kegiatan, Mahkamah Agung merevitalisasi kelompok kerja kemudahan berusaha berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 264/KMA/SK.HK2/XI/2023. Perkembangan dan capaian terhadap dukungan kemudahan berusaha pada 2023 ada pada beberapa hal, yaitu sebagai berikut.

1. Penyesuaian dan pengembangan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) dan persidangan elektronik (*e-litigation*) dilakukan untuk pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, khususnya yang berkaitan dengan perkara komersial/perdata khusus.
2. Penyempurnaan ekosistem pendukung sistem eksekusi putusan perdata melalui penyusunan pedoman pelaksanaan putusan perkara perdata oleh kelompok kerja SK KMA Nomor 5/KMA/SK/I/2022.
3. Finalisasi rancangan petunjuk teknis prosedur gugatan sederhana, khususnya yang terkait dengan penggunaan keterangan ahli dan biaya keterangan ahli.

4. Studi dan penyusunan revisi Peraturan MA yang mengatur kemitraan dalam perkara persaingan usaha.
5. Studi dan dialog terkait adopsi instrumen hukum internasional terkait kepailitan dan penanganan perkara komersial lintas batas. Hal ini turut melibatkan ahli dari unsur akademisi, baik nasional maupun internasional dan juga berkoordinasi erat dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian PPN/Bappenas.
6. Pertukaran ide dan gagasan dengan mitra peradilan negara sahabat, khususnya *Supreme Court of Singapore* dan *Federal Court of Australia*. Diskusi berfokus pada bidang perkara komersial.
7. Studi terhadap konsistensi putusan perkara pada bidang hukum komersial dengan mengundang akademisi, peneliti, dan praktisi hukum untuk berpartisipasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahkamah Agung (Lokali MA).
8. Pelaksanaan kegiatan pendukung sekaligus sosialisasi perkembangan kemudahan berusaha, yaitu antara lain Lomba Foto Peradilan 2023 dan Anugerah Mahkamah Agung 2023.

Peningkatan Pelayanan Peradilan melalui Persidangan Elektronik

Capaian implemementasi penyelesaian perkara pengadilan elektronik pada tahun 2023 mencapai 313.947 perkara dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Perkara *e-Court* dan *e-Litigasi* di Badan Peradilan

No.	Lingkungan Peradilan	<i>e-Court</i>	<i>e-Litigasi</i>
1.	Peradilan umum	125.660	124.234
2.	Peradilan agama	185.629	184.747
3.	Peradilan tata usaha negara	2.658	2.634
Total		313.947	311.615

Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana dan Mediasi

Gugatan Sederhana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan gugatan sederhana, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 163/KMA/SK/VIII/2023 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun

2023 yang diikuti oleh pengadilan tingkat pertama se-Indonesia.

Mediasi

Dalam rangka mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 163/KMA/SK/VIII/2023 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2023 telah menetapkan pengadilan berprestasi dalam hal mediasi.

Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi Putusan dan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi Perdata

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja layanan eksekusi putusan, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 163/KMA/SK/VIII/2023 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2023 telah menetapkan pengadilan berprestasi dalam pelaksanaan kinerja layanan eksekusi putusan perdata.

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

Dalam rangka mengoptimalkan keterbukaan informasi ke masyarakat, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 163/KMA/SK/VIII/2023 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2023 telah menetapkan pengadilan berprestasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi.

Keadilan Restoratif

Pada tahun 2023 jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi sebanyak 657 perkara dengan perincian jumlah perkara yang berhasil diversi sebanyak 464 perkara, sedangkan jumlah perkara yang gagal diversi sebanyak 189 perkara. Jumlah perkara yang belum diproses diversi sebanyak 4 perkara.

Inovasi Pelayanan Publik

Aplikasi yang berhasil dibuat pada tahun 2023, antara lain, adalah sebagai berikut.

1. *Court Live Streaming* merupakan aplikasi yang memungkinkan masyarakat dapat menyaksikan pembacaan amar putusan kasasi dan peninjauan kembali secara langsung melalui *live streaming*.

2. Inovasi Cerdas-KUM adalah inovasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum agar usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lebih memahami hukum, khususnya jika berperkara di pengadilan.
3. Aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (SATU JARI) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk melakukan pengumpulan data dan pemantauan kinerja pengadilan di lingkungan peradilan umum secara *real time*.
4. Aplikasi Sisuper (*aplikasi survey pelayanan elektronik*) telah menambahkan 2 fitur baru, yaitu fitur formula Krejcie Morgan serta penambahan fitur survei zona integritas.
5. Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (Lentera) Versi 2.
6. Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (Ampuh).
7. Sipintar (Sistem Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan Agama). Aplikasi ini telah digunakan dalam setiap kegiatan bimtek di lingkungan peradilan agama tahun 2023 dengan pengguna sejumlah 22.172 orang.
8. ETR (*Electronic Track Record*)
Pada tahun 2023 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI telah mengembangkan aplikasi rekam jejak secara elektronik (*electronic track record*). Data yang ditelusuri meliputi integritas, kompetensi (teknis, manajerial, dan sosio kultural), kualifikasi, serta kinerja.
9. Update terbaru pada *Monitoring Implementasi SIPP* Pengadilan Tinggi adalah pengembangan fitur informasi publikasi perkara yang menarik perhatian publik yang sudah terintegrasi dengan aplikasi Satu Jari.
10. Monekstun 2.0 merupakan aplikasi yang dibangun untuk mempermudah dalam mengakses informasi terkait eksekusi perkara pada Peradilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia yang terintegrasi dengan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada unit kerja masing-masing.

11. SIPAT merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai portal PTSP yang di dalamnya berisi pengaduan, konsultasi, pelayanan informasi, obrolan langsung (*live chat*) kepada masyarakat umum dan pemangku kepentingan (*stakeholder*).
12. Sistem Pelayanan Terpadu (Deskinfo), yaitu layanan PTSP daring (*online*) dalam bentuk portal website.

Layanan Peradilan bagi Masyarakat Tidak Mampu

- a) Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Tabel Realisasi Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Tahun 2023

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara
1.	Peradilan umum	437
2.	Peradilan agama	32.506
3.	Peradilan tata usaha negara	19
	Total	32.962

- b) Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Tabel Data Layanan Posbakum di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2023

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Jam Layanan
1.	Peradilan umum	67.444
2.	Peradilan agama	342.854
3.	Peradilan tata usaha negara	3.425
	Total	413.723

- c) Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Tabel Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer pada Tahun 2023

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Layanan
1.	Peradilan umum	3.832
2.	Peradilan agama	35.791
3.	Peradilan militer	62
	Total	39.685

d) Pelayanan Terpadu Sidang Keliling
Pelayanan terpadu sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah pada tahun 2023 telah memberikan layanan sebanyak 6.177 perkara.

Kemudahan Akses bagi Penyandang Disabilitas

Mahkamah Agung pada tahun 2023 telah memberikan dukungan anggaran kepada 124 pengadilan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 49/SEK/SK/XII/2022 tentang Penetapan 124 Pengadilan yang Mendapatkan Anggaran Pengadaan Sarana Prasarana Layanan Disabilitas TA 2023 untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyandang disabilitas.

Keterbukaan Informasi Publik

- Pelayanan Informasi
Sepanjang tahun 2023 Direktori Putusan telah diakses oleh 5.190.601 orang.
- Pelayanan Meja Informasi dalam PTSP
Meja informasi telah terintegrasi dalam PTSP di pengadilan seluruh Indonesia.

DATA PELAYANAN INFORMASI PTSP PENGADILAN

No.	Informasi	Jumlah Layanan
1.	Layanan informasi Mahkamah Agung	3.629
2.	Layanan informasi Badilum	294.419
3.	Layanan informasi Badilag	326.377
4.	Layanan informasi Badilmiltun (peradilan militer)	262
5.	Layanan informasi Badilmiltun (peradilan TUN)	1.637
Total		626.324

c) Publikasi Melalui Media Cetak

Majalah Mahkamah Agung

Pada tahun 2023 telah diterbitkan tiga edisi sebanyak 3.600 eksemplar. Pada edisi 31 sebanyak 1.200 eksemplar, edisi 32 sebanyak 1.200 eksemplar, dan edisi 33 sebanyak 1.200 eksemplar. Majalah Mahkamah Agung juga dapat diakses secara elektronik melalui tautan <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/>.

Newsletter Kepaniteraan

Kepaniteraan Mahkamah Agung memiliki *newsletter* yang memuat informasi, baik mengenai administrasi maupun teknis perkara di Mahkamah Agung. Selain itu, Kepaniteraan MA juga memiliki majalah yang pada tahun 2023 terbit satu edisi dengan tajuk utama “Modernisasi Mahkamah Agung untuk Peradilan yang Agung” yang dapat diakses secara elektronik melalui tautan <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/majalah>.

Majalah Dandapala

Tabel Rekap Jumlah Pencetakan Majalah Dandapala

Tahun Cetak	Edisi/Bulan	Vol. Cetak	Total Cetak/ Thn Anggaran
2023 (6 Edisi)	Edisi 51 (Januari--Februari 2023)	1750	9150
	Edisi 52 (Maret--April 2023)	1850	
	Edisi 53 (Mei--Juni 2023)	1850	
	Edisi 54 (Juli--Agustus 2023)	1850	
	Edisi 55 (September--Oktober 2023)	1850	
	Edisi 56 (November--Desember 2023)	1850	

Majalah Peradilan Agama

Pada tahun 2023 majalah peradilan agama terbit 1 (satu) kali, yaitu Edisi 22 pada bulan Agustus 2023 mengangkat tema “Tingkatkan Integritas Menuju Peradilan yang Agung”. *Majalah Peradilan Agama* juga dapat diakses secara elektronik melalui tautan <https://badilag.mahkamahagung.go.id/majalah/publikasi/majalah-peradilan-agama-edisi-5>.

Jurnal Hukum dan Peradilan

Jurnal Hukum dan Peradilan merupakan sarana bagi insan peradilan, akademisi, praktisi, serta pemerhati hukum untuk mengaktualisasikan ide pemikiran dalam bentuk karya tulis ilmiah yang didasarkan atas hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan dalam lingkup hukum dan peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan* diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung yang terbit tiga kali dalam setahun.

Jurnal Hukum dan Peradilan dapat diakses secara elektronik melalui <https://jurnalhukumdanperadilan.org>.



Bab 3

Manajemen Sumber Daya Manusia

PROGRAM PEMBARUAN

Dalam mendukung terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi sebagai bagian dari cara kerja sistem Satu Data Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Mahkamah Agung telah mengintegrasikan data kepegawaian pada Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep) yang merupakan aplikasi berbasis web dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) milik Badan Kepegawaian Negara. Pengintegrasian data kepegawaian tersebut dilakukan untuk meningkatkan koordinasi antara Mahkamah Agung dengan Badan Kepegawaian Negara agar pelayanan administrasi kepegawaian menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan koordinasi antarlembaga, terutama yang bersifat digital, Mahkamah Agung membuat langkah-langkah strategis dalam mempersiapkan talenta digital sebagai bagian dari SMART ASN di antaranya yaitu sebagai berikut.

PEROLEHAN AKREDITASI A UNIT PENILAIAN KOMPETENSI (ASSESSMENT CENTER) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit Penilaian Kompetensi (*Assessment Center*) Mahkamah Agung mendapatkan Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 001/BKN/XI/2023 tanggal 6 November 2023

CORPORATE UNIVERSITY (CORPU)

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah diinisiasinya rencana pembentukan “Mahkamah Agung *Corporate University*” sebagai suatu langkah inovatif menuju tercapainya cita-cita modernisasi lembaga peradilan. Penerapan konsep *corporate university* sebagai suatu konsepsi ideal dalam pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan di Mahkamah Agung diharapkan

menjadi kawah candradimuka bagi Mahkamah Agung dalam peningkatan kompetensi hakim dan aparatur peradilan agar mampu menjawab tantangan perubahan zaman yang dinamis dan kebutuhan untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung.

REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI PEGAWAI

Tabel Jumlah dan Komposisi Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2023

Jabatan	MA	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN		Jumlah
		Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	
Hakim Agung	47									47
Hakim Tinggi Yustisial	13	13								26
Hakim Yustisial	237	41		4	1			1		284
Hakim	87	722	3333	405	2346	32	115	55	275	7370
Hakim Ad Hoc	9	110	316							435
Panitera		646	3757	600	2709	19	90	87	295	8203
Jurusita			1658		1088			7	63	2816
Struktural	339	232	1391	234	1462	28	72	55	112	3925
Fungsional	502	221	475	243	587	10	14	22	71	2145
Pelaksana	459	569	2823	373	2093	71	259	61	166	6874
Total	1693	2554	13753	1859	10286	160	550	288	982	32125

*data SIKEP per 31 Desember 2023

UNIT PENILAIAN KOMPETENSI (ASSESSMENT CENTER)

Dalam rangka penerapan pengelolaan SDM berbasis kompetensi, pada tahun 2023 Unit Penilaian Kompetensi (Assessment Center) Mahkamah Agung melakukan kegiatan penilaian potensi dan kompetensi yang dilaksanakan secara daring ataupun luring. Selama tahun 2023 Unit ini telah melakukan pemetaan kompetensi terhadap ASN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya terhadap 2.734 pegawai.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel Capaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023

No.	Unit Eselon II	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan	3400	3284	96,59
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	3730	4031	108,06
Total		7130	7315	102,59

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TEKNIS PERADILAN

Tabel Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM di Bidang Teknis

No.	Jenis Program Pelatihan	Peserta (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu Tahun 2023	40	25	62,50
2.	Pelatihan Sertifikasi Prioritas Nasional Tahun 2023	680	697	102,50
3.	Pelatihan Sertifikasi Nonprioritas Nasional Tahun 2023	360	363	100,83
4.	Pelatihan Berkelanjutan bagi Hakim/ <i>Continuing Judicial Education</i> (CJE) Tahun 2023	320	316	98,75
5.	Pelatihan Teknis Yudisial Tahun 2023	830	865	104,22
6.	Pelatihan Singkat Tahun 2023	690	542	78,55
7.	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera dan Jurusita Tahun 2023	480	476	99,17
Total		3400	3284	96,59%

KERJA SAMA PELATIHAN

Tabel Kerja Sama Pelatihan

No.	Kementerian/Lembaga	Jumlah Peserta
1.	BPSDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	87
2.	Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia	3
3.	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI	1
4.	Komisi Yudisial Republik Indonesia	63
5.	Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia	419
6.	Pusat Pelaporan Keuangan dan Transaksi Keuangan (PPATK)	70
7.	Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan	112

No.	Kementerian/Lembaga	Jumlah Peserta
8.	Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan <i>Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit</i> (GIZ)	39
9.	ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) and Council of ASEAN Chief Justice (CACJ)	30
10.	<i>Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training</i> (OPDAT)	14
11.	<i>United Nations Office on Drugs and Crime</i> (UNODC) and ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT)	5
12.	<i>Norwegian Centre for Human Right</i> (NHCR) dan Lembaga Kajian Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)	13
13.	<i>Indonesian Center for Environmental Law</i> (ICEL) and Client Earth	48
Total		904

BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)

Tabel Jumlah Bimbingan Teknis

No.	Unit Kerja	Jumlah Jenis Bimtek	Jumlah Total Peserta
1.	Kepaniteraan	7 jenis bimtek	594
2.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	5 Jenis bimtek	620
3.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	17 jenis bimtek	29225
4.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	6 jenis bimtek	269
Total		35 jenis bimtek	30088

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM DI BIDANG MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN

Tabel Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan

No.	Jenis Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2023	0	9	
2.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2023	170	185	108,82
3.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Umum Tahun 2023	2560	2961	115,66
4.	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Tahun 2023	1000	964	96,40
Total		3730	4110	110,18

TANDA KEHORMATAN DAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2023

No.	Penghargaan	Jumlah
1.	Satyalancana Karya Satya XXX	1868
2.	Satyalancana Karya Satya XX	667
3.	Satyalancana Karya Satya X	635
Total		3170

Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Karya Satya Tahun 2023

No.	Penghargaan	Jumlah
1.	Karya Satya Sewindu	1151
2.	Karya Satya Dwiwindu	662
Total		1813

PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL

Mahkamah Agung melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan nasional dan merupakan program prioritas nasional, yaitu pelatihan sertifikasi hakim niaga, pelatihan sertifikasi hakim mediator, pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup, dan pelatihan sertifikasi sistem peradilan pidana anak terpadu. Berikut adalah perinciannya.

Tabel Jumlah Peserta Pelatihan

No.	Pendidikan dan Pelatihan	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga	80	80	100
2.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator Tahun 2023	280	280	100
3.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Tahun 2023	160	167	104,38
4.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak Terpadu Tahun 2023	160	170	106,25
		680	697	102,50



Bab 4

Manajemen Keuangan, Aset, dan Teknologi Informasi

PROGRAM PEMBARUAN

Dalam kurun waktu tahun 2023 Sekretariat Mahkamah Agung telah melakukan beberapa pembaruan inovatif berbasis teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, khususnya dalam hal tata kelola keuangan berbasis teknologi informasi, pengelolaan BMN yang *adaptif* dan *responsif*, pembaruan teknologi informasi, manajemen keuangan, manajemen aset, dan manajemen teknologi informasi.

TATA KELOLA KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Selain penggunaan aplikasi SAKTI yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung juga mengembangkan aplikasi internal untuk menunjang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dikelolanya, yaitu sebagai berikut.

1. Aplikasi SIMARI (Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia).

2. Aplikasi e-BIMA (*electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability*).
3. Aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas)

PENGELOLAAN BMN YANG ADAPTIF DAN RESPONSIF

Pengelolaan BMN di Mahkamah Agung beradaptasi dengan perubahan teknologi yang terus berkembang. Dengan menerapkan sistem pengelolaan BMN yang berbasis teknologi informasi melalui E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhancement Work Application*), Mahkamah Agung dapat mengoptimalkan proses inventarisasi, perencanaan, penggunaan hingga pemanfaatan aset negara secara lebih efektif dan optimal.

PEMBARUAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam rangka mendukung peradilan modern, saat ini Mahkamah Agung telah menerapkan sistem peradilan berbasis teknologi informasi. Hal tersebut dilakukan

untuk mendorong birokrasi di lembaga peradilan menjadi ringkas, cepat, dan berbiaya ringan. Mahkamah Agung berkomitmen untuk selalu konsisten melakukan perbaikan, pembaruan, dan reformasi sistem peradilan yang ada di Indonesia.

MANAJEMEN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023

Mahkamah Agung melakukan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023, Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023, dan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023, yaitu dilakukan secara daring dan luring.

Dalam rangka peningkatan tata kelola keuangan negara dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang telah dibelanjakan, selama tahun 2023 Biro Keuangan Badan Urusan Mahkamah Agung telah melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut.

1. Meningkatkan komitmen dan integritas pimpinan hingga staf dalam mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang sehat, efisien, akurat, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Melakukan pembinaan, asistensi, *monitoring* dan evaluasi, serta pengawasan yang secara terus-menerus atas pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan kepada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
3. Menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi yang intensif secara berjenjang antarunit organisasi tingkat K/L, eselon I, wilayah, dan satuan kerja serta unit internal pada bagian masing-masing.
4. Menerapkan slogan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja bersama dalam mengelola keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang efisien, akurat, akuntabel, dan transparan serta tepat saji.
5. Memanfaatkan menu *to do list*, *monitoring*, dan daftar/perincian pada aplikasi MonSakti untuk memantau dan menindaklanjuti kualitas data laporan keuangan agar tidak dikenai sanksi administratif dari KPPN/Kanwil DJPB penundaan pencairan anggaran apabila

tidak menyelesaikan penginputan, pencatatan, koreksi data, dan rekonsiliasi yang sudah menjadi kewajiban satuan kerja.

6. Menyusun laporan keuangan dari tingkat satker, wilayah, eselon I, dan kementerian/ lembaga dengan tepat waktu pada semester I, triwulan III, semester II *unaudited* dan *audited* yang memenuhi karakteristik laporan keuangan, yaitu relevan dan andal serta dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Apabila tidak menyusun dan tidak menyampaikan laporan keuangan, akan dikenai sanksi administratif dari KPPN/Kanwil DJPB berupa penundaan pencairan anggaran.
7. Melaporkan saldo kas keuangan perkara dan saldo keuangan perkara di rekening pemerintah lainnya (RPL) dalam penguasaan Bendahara Penerimaan (termasuk saldo RPL) setiap bulan sebagai Lembar Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan ke KPPN dan melakukan verifikasi serta dapat menjelaskan penyajian akun Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada penjelasan atas pos-pos neraca dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
8. Meminimalkan temuan berulang BPK atas pengelolaan keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK bahwa masih terdapat temuan ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan dan belum berjalannya sistem pengendalian internal (SPI) secara memadai.
9. Mengimplementasikan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) dalam merealisasikan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
10. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2022 sesuai dengan rencana aksi.
11. Menindaklanjuti rekomendasi hasil revidu Badan Pengawasan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I dan Triwulan III Tahun 2023.

Revisi Pedoman Akuntansi Berbasis AkruaL dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya

Tahun 2023 Mahkamah Agung melaksanakan

pemuktahiran pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual bersama Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Biro Perencanaan dan Organisasi, serta Biro Perlengkapan BUA Mahkamah Agung dalam rangka merevisi pedoman akuntansi yang diterbitkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 340/SEK/PL.1.2.1/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 hal Penerapan dan Penilaian Intern atas Laporan Keuangan (PIPK) pada tahun 2023 dilakukan sebanyak 930 satuan kerja di seluruh Indonesia.

PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Mahkamah Agung telah melaksanakan anggaran berbasis kinerja terkait tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung, yaitu penyelesaian perkara dengan mengusulkan dukungan anggaran untuk penyelesaian perkara pidana umum, perkara pidana militer, dan perkara hubungan industrial dengan maksimal tuntutan sebesar Rp150.000.000,00.

Dalam PMK Nomor 151 Tahun 2022 diatur besaran satuan biaya penyelesaian perkara per perkara dengan perincian sebagai berikut.

Standar Biaya Keluaran (SBK) Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

1.	Perkara pidana umum	Rp11.273.465.000,00 untuk volume 6.800 perkara
2.	Perkara pidana militer	Rp199.500.000,00 untuk volume 210 perkara
3.	Perkara PHI < 150 jt	Rp597.025.000,00 untuk volume 715 perkara

PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pagu Alokasi Anggaran

No.	Unit Eselon I	Pagu Alokasi 2023	Automatic Adjustment	Relaksasi AA	Pemotongan	Pagu Menjadi 2023
1.	Kepaniteraan	205.600.181.000,00	719.641.000,00	4.519.641.000,00	0	209.400.181.000,00
2.	Badan Peradilan Umum	136.744.564.000,00	3.227.478.000,00	3.052.937.000,00	174.541.000,00	136.395.482.000,00
3.	Badan Peradilan Agama	116.679.332.000,00	3.023.959.000,00	2.823.959.000,00	200.000.000,00	116.279.332.000,00
4.	Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	29.038.094.000,00	658.664.000,00	658.664.000,00	0	29.038.094.000,00
5.	Badan Urusan Administrasi	11.516.823.671.000,00	870.907.999.000,00	517.764.673.000,00	3.48.343.326.000,00	11.164.908.312.000,00
6.	Badan Pengawasan	73.575.438.000,00	2.424.357.000,00	1.847.050.000,00	577.307.000,00	73.420.824.000,00
7.	Badan Litbang Diklat Kumdil	167.757.130.000,00	5.726.356.000,00	4.689.555.000,00	1.036.801.000,00	165.683.528.000,00
Total		12.246.218.410.000,00	886.688.454.000,00	536.356.479.000,00	350.331.975.000,00	11.895.125.753.000

Tabel Perkembangan Anggaran Mahkamah Agung dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023

No.	Tahun Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Total Anggaran (Rp)
1.	2019	6.626.485.409.000,00	1.731.265.814.000,00	687.999.037.000,00	9.045.750.260.000,00
2.	2020	7.079.514.631.000,00	2.125.156.095.000,00	650.235.304.000,00	9.854.906.030.000,00
3.	2021	7.248.801.219.000,00	2.308.362.816.000,00	1.681.783.351.000,00	11.238.947.386.000,00
4.	2022	7.486.002.321.000,00	2.592.696.388.500,00	1.741.434.690.500,00	11.820.133.400.000,00
5.	2023	7.333.345.686.000,00	2.730.640.295.000,00	1.844.937.734.000,00	11.908.923.715.000,00

Hibah

	Jumlah satker	Jumlah Dokumen	Nilai Perolehan (Rp)
Hibah barang	240	469	111.338.329.996,00
Hibah uang	9	9	15.632.110.000,00
Hibah jasa	8	8	3.211.124.571,00
Total	202	350	130.181.564.567,00

REALISASI ANGGARAN

Dalam merealisasikan anggaran Mahkamah Agung pada tahun anggaran 2023, total pagu awal adalah Rp12.246.218.410.000,00 dan mengalami penyesuaian anggaran (*refocusing*) sebesar Rp350.331.975.000,00, kemudian mendapatkan hibah sebesar Rp15.631.914.000,00. Penggunaan dana PNBPN sebesar Rp16.032.834.000,00 sehingga total pagu menjadi Rp11.911.520.197.000,00 dan realisasi Rp11.594.034.601.949,00 presentase 97,33%.

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Mahkamah Agung merupakan salah satu penyumbang tertinggi ke kas negara sebagai sumber utama penerimaan dalam pembiayaan belanja pemerintah. Pada tahun 2023 target PNBP Mahkamah Agung diusulkan sebesar Rp86.622.707.000,00 (Delapan puluh enam miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PNBP. Realisasi PNBP per tanggal 31 Desember 2023, Mahkamah Agung telah mencapai Rp102.287.576.863 (Seratus dua miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) atau setara dengan 118%.

PENGUNAAN DANA PNBPN TAHUN 2023

REALISASI BELANJA SUMBER DANA PNBPN MAHKAMAH AGUNG 2023 PER ESELON I PER 31 DESEMBER 2023						
No.	Kode Satker	Nama Satker	Nilai Pagu	Nilai Realisasi	%	Sisa Pagu
1.	004028	Kepaniteraan	22.480.000	20.424.000	90,85%	2.056.000
3.	097450	Badan Peradilan Umum	4.028.427.000	4.020.569.500	99,80%	7.857.500
4.	663712	Badan Peradilan Agama	11.819.148.000	11.819.133.500	99,99%	14.500
5.	663122	Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara	162.779.000	162.400.000	99,77%	379.000
Total			16.032.834.000	16.022.527.000	99,94%	10.307.000

*Sumber data sdd pnbpn kemenkeu

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 (TGR)

Tabel Kerugian Negara Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Status penyelesaian	JUMLAH KASUS	JUMLAH KERUGIAN NEGARA	PEMBAYARAN ANGSURAN DAN REVIU BADAN PENGAWASAN S/D 31 Desember 2023	SISA ANGSURAN	
A	SUDAH PENETAPAN				
1.	TGR bendahara	4	1.114.246.950,00	1.114.246.950,00	0,00
2.	TGR nonbendahara	259	3.140.339.047,00	3.127.839.047,00	12.500.000,00
3.	Pihak ketiga	0	0,00	0,00	0,00
B	PROSES PENETAPAN				
1.	TGR bendahara	1	22.772.000,00	0,00	22.772.000,00
2.	TGR NON BENDAHARA	0	0,00	0,00	0,00
3.	PIHAK KETIGA	0	0,00	0,00	0,00
C	INFORMASI				
1.	BPK	441	25.105.030.304,98	25.105.030.304,98	0,00
2.	APIP	16	518.543.961,76	482.291.735,98	36.252.225,78
JUMLAH		718	29.900.932.263,74	29.852.180.037,96	48.752.225,78

TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI PEMERIKSAAN BPK

Tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK sampai dengan semester I tahun 2023 telah selesai 100%, yaitu sebanyak 1.714 rekomendasi.

MANAJEMEN ASET

CAPAIAN KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Nilai BMN Mahkamah Agung

Nilai barang milik negara (BMN) Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) tahun 2023 adalah Rp31.765.293.728.890 (Tiga puluh satu triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

Beberapa pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 5.3.0

Pada tahun 2023 Mahkamah Agung RI terus melakukan peningkatan terhadap aplikasi SIPP sesuai dengan perubahan kebijakan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persiapan di Pengadilan secara Elektronik.

Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU) Mahkamah Agung Versi 3.0.0

Dalam menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, pada tahun 2023 telah dilakukan penyempurnaan fitur pada aplikasi e-BERPADU 3.0.0.

Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) Mahkamah Agung RI

Pada tahun 2023 Mahkamah Agung telah melakukan pengembangan SPPT-TI Mahkamah Agung yang terintegrasi dengan aplikasi e-BERPADU dalam hal pemanfaatan dan pertukaran data permintaan izin dan persetujuan penggeledahan serta data permintaan izin dan persetujuan penyitaan.

Smart Majelis

Pada tahun 2023 Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi Smart Majelis bertepatan dengan ulang tahun ke-78 Mahkamah Agung. Smart Majelis adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berbasis robotika kecerdasan buatan untuk memilih majelis hakim secara otomatis. Dalam memilih majelis hakim, aplikasi ini menggunakan berbagai faktor, termasuk pengalaman, kompetensi, beban kerja hakim, serta jenis perkara yang akan diadili agar hakim yang dipilih memiliki keahlian yang sesuai.

Sistem Informasi Mahkamah Agung RI-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pada tahun 2023 Mahkamah Agung telah melakukan pembaruan aplikasi SIMARI-PNBP dari versi 2.1.2 menjadi versi 2.2.0 untuk Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya agar mempermudah dalam melakukan pencatatan, penyajian informasi, dan laporan-laporan seputar PNBP.

Kegiatan Surveillance Audit ISO 20000-1:2018 Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi

Sebagai bentuk evaluasi berkelanjutan dan memastikan komitmen organisasi dalam pengimplementasian ISO 20000-1:2018 dilakukan surveillance audit ISO 20000-1:2018 tahun I (pertama) pada bulan Oktober 2023. Dari hasil audit yang dilakukan, tidak terdapat temuan yang bersifat *major* ataupun *minor*.

Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan Sosialisasi

Untuk dapat meningkatkan kemampuan pengguna dalam penggunaan aplikasi yang dikembangkan serta dapat terimplementasi secara optimal, telah dilaksanakan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, ataupun sosialisasi pengguna kepada seluruh aparat peradilan. Dari kegiatan tersebut diharapkan aparat peradilan dapat mengimplementasikan aplikasi-aplikasi yang telah dibangun di lingkungan satuan kerja masing-masing. Kegiatan-kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, dan sosialisasi tersebut, antara lain, adalah sebagai berikut.

1. *Training of trainer* fitur terbaru pada aplikasi e-Court versi 5.0.0
2. *Training of trainer* fitur terbaru pada aplikasi sistem informasi penelusuran perkara tingkat pertama versi 5.2.0.
3. *Training of trainer* aplikasi elektronik berkas pidana terpadu (e-BERPADU) Mahkamah Agung versi 3.0.0
4. *Training of trainer* aplikasi *Smart Majelis*

Sistem Informasi Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali

Dalam menindaklanjuti arahan pimpinan, pada awal tahun 2023 Tim Development Mahkamah Agung telah melakukan penyesuaian terhadap Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung (SIP) sesuai dengan Perma 7 Tahun 2022 dan Perma 8 Tahun 2022. Pada 3 bulan terakhir tahun 2023 hingga saat ini, tim sedang mengembangkan sistem informasi untuk pengadministrasian pengajuan upaya hukum perkara kasasi dan peninjauan kembali sebagai tindak lanjut dari Perma 6 Tahun 2022.



Bab 5

Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan dan Putusan-Putusan Penting (*Landmark Decisions*)

PROGRAM PEMBARUAN

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035 yang ditetapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia menuntut peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Puslitbang Kumdil MA RI) sebagai *center of excellence* sekaligus *center of thinker* dalam pembentukan kebijakan dan keberlangsungan organisasi Mahkamah Agung. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengalihkan tugas, fungsi, dan kewenangan unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/ lembaga menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan BRIN. Kebijakan itu berdampak pada keberadaan Puslitbang Kumdil MA RI yang menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan.

PROGRAM PENYUSUNAN REKOMENDASI PEMBENTUKAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

Pada Tahun 2023 telah diselenggarakan 31 (tiga puluh satu) kegiatan yang menghasilkan produk berupa naskah kebijakan, naskah akademik, dan naskah urgensi yang dijadikan landasan pembentukan serta evaluasi kebijakan pada Mahkamah Agung. Untuk mengawali pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan penyamaan persepsi serta penyegaran pengetahuan melalui kegiatan bimbingan teknis bagi para koordinator beserta tim pendukung penyusunan naskah kebijakan, naskah akademik, ataupun naskah urgensi. Bimbingan teknis dilaksanakan pada tanggal 15--17 Februari 2023 di Makassar dengan menghadirkan narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).

PUBLIKASI E-BOOK PUSLITBANG KUMDIL MARI

Teknologi Informasi yang semakin berkembang dimanfaatkan oleh Puslitbang Kumdil MA RI untuk menyebarluaskan terbitan karya hasil Puslitbang Kumdil MA RI. Seluruh karya (kajian) sejak tahun 2010 sampai saat ini dapat diakses secara daring dalam bentuk e-book melalui sebuah *website* (www.e-book.bldk.mahkamahagung.go.id). Pada *website* tersebut juga dapat dimanfaatkan fitur *text to voice* untuk membantu mengetahui isi konten dengan cara didengarkan sehingga mempermudah penyandang disabilitas (tunanetra) dalam mengakses hasil kajian yang dilakukan Puslitbang Kumdil MARI. Pemanfaatan e-book ini memudahkan Puslitbang Kumdil MA RI dalam menyebarluaskan hasil-hasil kajian secara luas dan cepat, tercatat pada tahun 2023 e-book ini telah diakses sebanyak 7.825 kali.

JURNAL HUKUM DAN PERADILAN (JHP)

Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP) merupakan wadah bagi para hakim, akademisi, praktisi, peneliti, dan ahli hukum dalam menyebarluaskan gagasan dan pemikiran di bidang hukum dan peradilan. JHP dapat diakses secara daring melalui laman www.jurnalhukumdandanperadilan.org. Pada tahun 2023 JHP berhasil mempertahankan akreditasi dengan predikat SINTA 2 (S2) pada pemeringkat nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Pemanfaatan terhadap hasil terbitan *Jurnal Hukum dan Peradilan* ditandai dengan sitasi yang dilakukan para *scholar* dalam karya-karya ilmiahnya. Berdasar data Google Scholar, jumlah sitasi JHP tahun 2023 tercatat sebanyak 840 sitasi dan sejak tahun 2019 sebanyak 2988 sitasi

PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS)

KAMAR PIDANA

I. Putusan Nomor 2362 K/Pid.Sus/2023

Terdakwa	Pierre Togar Sitanggang, S.E., M.M
Jenis Perkara	Tindak Pidana Korupsi
Majelis Hakim	1. Dr. Suhadi, S.H.,M.H. 2. Dr. Agustinus Prunomo Hadi, S.H.,M.H. 3. Suharto, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti	Dwi Sugiarto, S.H.,M.H.
Kaidah Hukum	- Kerugian keuangan negara secara nyata dinikmati Korporasi, maka terhadap Terdakwa tidak dibebani uang pengganti; - Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara dengan kategori berat, kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa termasuk kategori sedang serta dampaknya berskala nasional sehingga pidananya perlu diperberat sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2020

II. Putusan Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022

Terdakwa	PT. Nickcrome Indo Jaya
Jenis Perkara	Tindak Pidana di bidang Lingkungan Hidup
Majelis Hakim	1. Dr. Suhadi, S.H.,M.H. 2. Soesilo, S.H.,M.H. 3. Suharto, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti	Dwi Sugiarto, S.H.,M.H.
Kaidah Hukum	Kondisi penempatan limbah B3 yang sudah diperbaiki saat sebelum pemeriksaan setempat tidak dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana, namun hanya menjadi pertimbangan untuk meringankan perbuatan Terdakwa

KAMAR PERDATA

I. Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Para Pihak	: YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA, Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitur terhadap PT MULYA HUSADA JAYA, Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU/Kreditor
Jenis Perkara	: Perkara Perdata Khusus Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Majelis Hakim	: 1. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M; 2. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. 3. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H
Panitera Pengganti	: Edy Wibowo, S.H., M.H.
Kaedah Hukum	: Kesempatan Debitur untuk melanjutkan usaha (going concern), perlu memperhatikan niat dan tujuan awal Kreditor mengajukan PKPU, dan memperhatikan kondisi Debitur masih dalam keadaan mampu membayar (solven) dan tidak dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvensi). Putusan PKPU tidak hanya mendasarkan pada keadaan mampu membayar (solven) maupun tidak dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvensi). Tetapi juga mendasarkan pada kesempatan debitur untuk melanjutkan usaha juga niat dan tujuan kreditor mengajukan PKPU. Bahwa Debitur merupakan Badan Hukum berbentuk Yayasan dengan bidang usaha menyelenggarakan pelayanan kesehatan sehingga dalam melaksanakan kegiatan usaha didasarkan pada nilai kemanusiaan dan mempunyai fungsi social yang tidak semata mata mencari keuntungan. Keterlambatan Debitur dalam melakukan pembayaran utang terhadap kreditor dikarenakan adanya pademi covid 19 yang merupakan bentuk keadaan forje majure (memaksa) sehingga pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran dalam keadaan tersebut merupakan bentuk Itikad Baik Debitur untuk melaksanakan kewajibannya .

II. Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Para Pihak	: PT NAGASWARA PUBLISHERINDO, atau lebih dikenal dengan NAGASWARA, Lawan 1. HALILINTAR ANOFIAL ASMID 2. LENGGOGENI UMAR FARUK Dan 1. YOGI ADI SETYAWAN, atau lebih dikenal dengan RPH 2. PIAN DARYONO, atau lebih dikenal DONALL
Jenis Perkara	: Perdata Khusus Hak Kekayaan Intelektual (hak cipta)
Majelis Hakim	: 1. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. 2. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. 3. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	: Frieske Purnama Pohan, S.H.
Kaedah Hukum	: - Pada dasarnya dalam pemeriksaan Persidangan Perkara Perdata Para pihak Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama sesuai asas "Audi Alterem Partem" untuk mengajukan Gugatan bagi Penggugat dan Jawaban yang berisi sanggahan Gugatan bagi pihak Tergugat. - Gugatan dan Jawaban Gugatan merupakan bentuk hak para pihak dalam bentuk uraian dalil-dalil yang bersifat untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing dalam suatu pemeriksaan perkara perdata. Sehingga dalam pemeriksaan perkara Perdata Gugatan dan Jawaban para pihak merupakan dasar berpihak bagi pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya untuk menilai kebenaran menurut hukum dalil-dalil para pihak dalam Surat Gugatan dan Surat Jawabannya dengan mensinkronkan atau menilai melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak berperkara dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pihak dalam Surat Gugatan maupun Surat Jawaban. - Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang mempertimbangkan bukti-bukti para pihak dengan hanya mendasarkan pada dalil-dalil dalam Surat Gugatan, tanpa adanya Surat Jawaban dari pihak Tergugat yang diajukan dalam pemeriksaan perkara ini, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim di Tingkat Kasasi, merupakan Putusan yang mengandung alasan "Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata" (lihat pasal 117 RV);

KAMAR AGAMA

I. Putusan Nomor 574 K/Ag/2022

Para Pihak	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, L a w a n PT AB CAPITAL ASSET MANAGEMENT,
Jenis/Klasifikasi Perkara	Ekonomi Syariah.
Majelis Hakim	1. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. 2. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. 3. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	Dr. H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.
Kaidah Hukum	1. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) meskipun bukan lembaga ekonomi syariah, namun sebagai penjamin Nasabah atas simpanan pada Bank Syariah LPS dapat mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama. 2. Nasabah yang menyebabkan bank tidak sehat sehingga bank gagal bayar, nasabah tersebut tidak berhak mendapatkan jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan.

II. Putusan Nomor 171/PK/Ag/2022

Para Pihak	CHUA SOO NGEE (P. SUHARTONO) BIN CHUA KIE MENG, L a w a n SANNY SANRAIS BINTI H. ABD. RAUF RAMLI
Jenis/Klarifikasi Perkara	Permohonan Cerai Talak Kumulasi Hak Asuh Anak (Hadhanah)
Majelis Hakim	Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Drs. H. Busra, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H
Kaidah Hukum	Untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka pengasuhan anak dapat diterapkan dengan konsep <i>joint physical custody</i> yaitu hak asuh bersama dimana ayah dan ibu berbagi tanggung jawab atas pengasuhan anak mereka sesuai dengan jadwal yang disepakati antara keduanya.

KAMAR TUN

1. Putusan Nomr 1418/B/PK/Pjk/2023

Para Pihak	HYUNDAI E&C & PT PP (PERSERO) TBK J/V, Sebagai Pemohon Peninjauan Kembali Melawan DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai Termohon Peninjauan Kembali
Jenis Perkara	Pajak
Majelis Hakim	1. Dr. H. Yulius, S.H. 2. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. 3. H. Is Sudaryono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Walaupun secara formal pelaporan nilai kompensasi tidak sesuai dengan limit waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, akan tetapi secara substansi Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding sudah melakukan pembetulan dan tidak terdapat kerugian negara dan keuntungan atau manfaat yang dinikmati oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding atas kesalahan pelaporan tersebut;

2. Putusan Nomor 128 PK/TUN/2023

Para Pihak	JENDERAL TNI (PURN) Dr. H. MOELDOKO, M.Si., dan drh. JHONNY ALLEN MARBUN, M.M., Sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali Melawan I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Sebagai Termohon Peninjauan Kembali I, II. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.SC., M.P.A., M.A., Dan H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T., sebagai Para termohon Peninjauan Kembali II
Jenis Perkara	Partai Politik
Majelis Hakim	1. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. 2. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. 3. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Adi Irawan, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Sengketa partai politik pada hakikatnya merupakan masalah penilaian internal Partai yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

3. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2023

Para Pihak	GUGUN DIMYATI dan YUSTIKA SARI, Sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali Melawan I. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Sebagai Termohon Peninjauan Kembali I, II. BILLY AMER SITORUS, Sebagai Termohon Peninjauan Kembali II
Jenis Perkara	Pertanahan
Majelis Hakim	1. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. 2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. 3. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
Panitera Pengganti	Mohamad Yusup, S.H.
Kaidah Hukum	Bukti surat yang menjadi dasar alas hak kepemilikan Penggugat adalah berbeda dengan surat-surat yang dinyatakan palsu oleh perkara pidananya, oleh karenanya putusan pidana tidak dapat membatalkan hak keperdataan (kepemilikan hak atas tanah) Penggugat;

4. Objek Sengketa Hak Uji Materil - 15 P/HUM/2023

Para Pihak	Prof. Dr.rer. NAT SAJIDAN, M.Si., sebagai Pemohon Melawan MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA sebagai Termohon
Jenis Perkara	Objek Sengketa Hak Uji Materil
Majelis Hakim	1. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. 2. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. 3. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Mohamad Yusup, S.H.
Kaidah Hukum	Mahkamah Agung RI hanya menguji pasal-pasal yang materi muatannya bersifat umum, abstrak, terhadap pasal-pasal yang bersifat individual, konkrit bukanlah merupakan objek pengujian hak uji materil di Mahkamah Agung RI; Pasal-pasal yang materi muatannya bersifat umum dan abstrak menjadi objek pengujian hak uji materil di Mahkamah Agung RI

5. Putusan Nomor 185 K/TUN/TF/2023

Para Pihak	YAYASAN NUR EL-SYAMS Sebagai Pemohon Kasasi Melawan I. DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Sebagai Termohon Kasasi I, II. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Sebagai Termohon Kasasi II
Jenis Perkara	Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan
Majelis Hakim	1. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. 2. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. 3. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Mohamad Yusup, S.H.
Kaidah Hukum	Apabila terdapat 2 (dua) atau beberapa perbuatan hukum dalam suatu peristiwa hukum yang terkait, maka perlu ditelaah apakah perbuatan hukum yang baru telah mengesampingkan/membatalkan perbuatan hukum yang sebelumnya, dan apabila benar perbuatan hukum yang baru telah mengesampingkan/membatalkan perbuatan hukum sebelumnya maka sudah sepatutnya yang di uji adalah perbuatan hukum baru tersebut, yang terkait juga dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi batu uji, akan tetapi apabila dalam perbuatan hukum yang lama tersebut ada persyaratan yang telah dipenuhi dan belum dikembalikan persyaratannya tersebut, maka perbuatan hukum yang baru tidak dengan serta merta meniadakan/membatalkan perbuatan hukum yang lama, dan sepatutnya pengujian dan batu uji nya dilakukan terhadap perbuatan hukum yang lama; Terhadap dua perbuatan hukum yang saling terkait, bila perbuatan hukum yang baru telah mengesampingkan/ membatalkan perbuatan hukum yang lama, hak uji materil yang digunakan adalah perbuatan hukum yang baru. Sebaliknya bila perbuatan hukum yang lama terdapat persyaratan yang terpenuhi dan belum dikembalikan, pengujian dan batu ujinya tetap dilakukan terhadap perbuatan hukum yang lama.

KAMAR MILITER

I. Putuan Nomor 99 K/Mil/2023

Terdakwa	Prajurit Satu Anasdin Panggabean
Jenis Perkara	Tindak pidana Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari
Majelis Hakim	1. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. 2. Hidayat Manao, S.H., M.H. 3. Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Panitera Pengganti	Indra Joseph Marpaung, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Prajurit yang telah dilepas dari kesatuan lama untuk melaksanakan surat perintah pindah satuan, tetapi tidak segera melapor di kesatuan baru, tidak diterapkan ketentuan tentang ketidakhadiran tanpa izin/ desersi karena yang bersangkutan belum tercatat sebagai anggota kesatuan baru. Terhadap perbuatan tersebut diterapkan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.



Bab 6

Pengawasan

PROGRAM PEMBARUAN

Dalam rangka mewujudkan misi Mahkamah Agung yang keempat, yaitu meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan, Badan Pengawasan Mahkamah Agung melakukan Pengembangan dengan berbasiskan teknologi informasi.

PENGEMBANGAN APLIKASI SEMAR

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, baik dari segi biaya maupun waktu, Badan Pengawasan berinisiatif melakukan evaluasi berbasis teknologi informasi dengan melakukan pengembangan Aplikasi Semar. Aplikasi Semar ini merupakan sarana evaluasi akuntabilitas kinerja secara elektronik bagi evaluator pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk menilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) atas penilaian mandiri (*self assessment*).

PENGEMBANGAN APLIKASI SIYANTO

Untuk meningkatkan fungsi pelayanan konsultasi, Badan Pengawasan Mahkamah Agung mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Konsultasi Online (Siyanto) dengan tujuan agar layanan konsultasi dapat dijangkau oleh seluruh satuan kerja setiap saat dan dapat dipertanggungjawabkan secara resmi.

PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

PENILAIAN PEMBANGUNAN DAN EVALUASI SISTEM MANAJEMEN ANTIPENYUAPAN (SMAP)

Pada tahun 2023 Badan Pengawasan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 40/BP/SK/III/2023 tentang Penunjukan Satuan Kerja Pelaksana Sistem Manajemen Antipenyuapan (SMAP) pada Tahun 2023.

Penilaian pembangunan dan evaluasi sistem manajemen antipenyuapan dilaksanakan dengan 4 mekanisme di bawah ini.

1. Tinjauan dokumen.
2. Uji petik .
3. Wawancara .
4. *Mysteri shopping* .

Tabel Satuan Kerja Yang Berhasil Menerapkan SMAP

No.	Satuan Kerja	Predikat	Kategori
1.	Pengadilan Agama Bantul	A	Pembangunan
2.	Pengadilan Tata Usahas Negara Manado	B	Pembangunan
3.	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	B	Pembangunan
4.	Pengadilan Agama Makassar	B	Pembangunan
5.	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	A	Evaluasi
6.	Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang	A	Evaluasi
7.	Pengadilan Negeri Wates	A	Evaluasi

Sementara itu, delapan belas satuan kerja lainnya dinyatakan ditangguhkan.

RAPAT KOORDINASI HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN RAPAT KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN

Tabel Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan Tahun 2023

No.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Kupang Tanggal 22--25 Agustus 2023	Wakil Ketua dan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tingkat Pertama	94 Orang	Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah IV (34 satker/luring) dan diikuti 79 satker secara daring).
2.	Jakarta Tanggal 7--10 November 2023	Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia	80 Orang	Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan

SATUAN TUGAS KHUSUS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG

Dalam merespons atas terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Mahkamah Agung RI, Badan Pengawasan MA membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) dengan melibatkan unsur hakim tinggi, hakim yustisial, auditor, auditor kepegawaian dan pegawai yang memeriksa disiplin waktu kerja aparatur peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dengan tujuan agar masuk dan pulang kantor tepat waktu. Selain itu, Satgasus juga mendata para tamu yang akan menghadap ke hakim agung dan aparatur peradilan dengan tujuan untuk memutus interaksi antara pihak berperkara dan hakim agung yang memeriksa perkaranya. Satgasus juga mengawasi ketaatan terhadap kode etik profesi hakim dan aparatur peradilan serta mengawasi mekanisme penyelesaian perkara agar penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) tidak berlarut-larut.

PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN

PENANGANAN PENGADUAN

Tahun 2023 pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejumlah **4.138** pengaduan dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Jumlah Pengaduan Tahun 2023

No.	Jenis Pengaduan	Masuk
1.	Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan	2.568
2.	Pengaduan dari instansi (<i>stakeholder</i> Mahkamah Agung)	219
3.	Pengaduan Aplikasi Siwas	1.351
Total		4.138

Tabel Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2023

No.	Jenis Tindaklanjut	Jumlah Tindak lanjut
1.	Masih dalam penyelesaian	189
2.	Selesai diproses	3.949
	a. Diperiksa Tim Bawas	103
	b. Delegasi ke pengadilan tingkat banding	92
	c. Konfirmasi	152
	d. Klarifikasi	982
	e. Memorandum/delegasi <i>internal</i>	82
	f. Surat jawaban	1.191
	g. Pelaksanaan pemantauan	50
	h. Pengarsipan	107
	i. Gabung berkas	1.149
	j. Pencabutan	41
Jumlah		4.138

Badan Pengawasan telah menindaklanjuti pengaduan masuk sejumlah 4.138 pengaduan. Pengaduan yang masih dalam penyelesaian berjumlah 189 pengaduan dan yang telah selesai ditindaklanjuti berjumlah 3.949 pengaduan (95,43%).

SIDANG MAJELIS KEHORMATAN HAKIM

Pada tahun 2023 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 4 (empat) orang hakim, 3 di antaranya dijatuhi hukuman disiplin sanksi berat pemberhentian tidak dengan hormat, dan 1 hakim dijatuhi sanksi berat pemberhentian tetap dengan hak pensiun.

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Tabel Hukuman Disiplin Tahun 2023

No.	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	30	29	86	145
	Hakim <i>ad hoc</i>	-	-	10	
2.	Panitera	3	2	7	12
3.	Sekretaris	2	3	4	9
4.	Panitera muda	3	5	4	12
5.	Panitera pengganti	12	6	22	40
6.	Jurusita	12	3	5	20
7.	Jurusita pengganti	3	-	4	7
8.	Pejabat struktural	7	5	3	15
9.	Pejabat fungsional	-	-	-	-
10.	Pelaksana	10	10	4	24
11.	PPNPN	1	-	-	1
Jumlah		83	63	149	295

Tabel Pemulihan Nama Baik (Rehabilitasi) Tahun 2023

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim	83
2.	Panitera	5
3.	Sekretaris	2
4.	Panitera muda	8
5.	Panitera pengganti	10
6.	Jurusita	3
7.	Jurusita pengganti	-
8.	Pejabat struktural	3
9.	Staf	4
10.	Calon hakim	-
11.	PPNPN	1
Jumlah		119

KEGIATAN PEMERIKSAAN REGULER

Tabel Data Pengawasan Reguler Tahun 2023

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan umum	20	36	25	5	86
Peradilan agama	25	26	24	6	81
Peradilan militer	-	1	-	1	2
Peradilan TUN	-	2*	2	1	5
Total	45	65	51	13	174

*Note: 1 Pengawasan Reguler Pengadilan Pajak

PEMANTAUAN (MONITORING)

Tabel: Rekapitulasi Jumlah Pengadilan Perkamar Peradilan

No.	Jenis Pengadilan	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan Tata Usaha Negara	Total
1.	Pengadilan tingkat pertama	78	78	2	5*	163
2.	Pengadilan tingkat banding	8	3	-	-	11
Total		86	81	2	5	174

*Note: 1 Pengawasan Reguler Pengadilan Pajak

Tabel: Klasifikasi Status Pemantauan Tindaklanjuti

No.	Bidang	Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1.	Manajemen peradilan	613	59	41	5
2.	Pelayanan publik	778	82	56	6
3.	Administrasi perkara	1049	139	103	12
4.	Administrasi persidangan	826	90	88	15
5.	Administrasi umum	1540	181	65	9
Total		4806	551	353	47

AUDIT KINERJA

Tabel Pelaksanaan Audit Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2023

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan umum	10	10	15	6	41
Peradilan agama	10	7	13	8	38
Peradilan TUN	2	3	2	-	7
Peradilan militer	1	-	-	-	1
Jumlah	23	20	30	14	87

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Atas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Birokrasi dan Melayani (WBBM)

Tabel Daftar Calon Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM tahun 2023

No.	Unit Kerja	Jumlah
1.	Lingkungan peradilan umum	
	a. Calon unit kerja berpredikat WBBM	18
	b. Calon unit kerja berpredikat WBK	29
2.	Lingkungan peradilan agama	
	a. Calon unit kerja berpredikat WBBM	25
	b. Calon unit kerja berpredikat WBK	65
3.	Lingkungan peradilan militer	
	a. Calon unit kerja berpredikat WBBM	1
	b. Calon unit kerja berpredikat WBK	3
4.	Lingkungan peradilan tata usaha negara	
	a. Calon unit kerja berpredikat WBBM	1
	b. Calon unit kerja berpredikat WBK	8
Total unit kerja yang diajukan		150

Hasil evaluasi zona integritas tahun 2023 oleh Tim Penilai Internal (TPI), Sekretaris Mahkamah Agung melalui Surat Nomor 1016/SEK/OT.01.1/5/2023 tanggal 23 Mei 2023 mengusulkan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) unit kerja atau sebanyak 49% (empat puluh sembilan persen) dari total unit kerja yang dievaluasi sebagai calon unit kerja berpredikat WBK/WBBM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan perincian sebagai berikut.

1. Enam puluh calon unit kerja berpredikat WBK
2. Tiga belas) calon unit kerja berpredikat WBBM

Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)

Selama tahun 2023 pengaduan yang masuk ke SIWAS MA RI mengenai pungli di pengadilan berjumlah 50 (lima puluh) pengaduan. Dari 50 pengaduan tersebut, 11 di antaranya telah dilakukan pemeriksaan, 16k klarifikasi, 8 konfirmasi, 1 pembuatan memorandum, dll.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Seluruh penyelenggara negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI yang berada di bawahnya wajib untuk menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara. Jumlah wajib lapor LHKPN sebanyak 18.242 dengan tingkat kepatuhan sebanyak 99,66%.



Bab 7

Peran Serta dan Kerja Sama

KERJA SAMA

KERJA SAMA NASIONAL

Nota Kesepahaman dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Pada 21 Maret 2023 Mahkamah Agung RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penguatan Kapasitas Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1/NK/MA/2023A/NK/7/2017 dan Nomor PKS.6/SETJEN/ROCAN/SET.1/3/2023.

Nota Kesepahaman dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman pada Rabu, 6 Desember 2023 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Nota Kesepahaman dengan PT Pos Indonesia (Persero)

Pada 22 Mei 2023 Mahkamah Agung RI menandatangani kerja sama dengan PT Pos Indonesia tentang Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung dan PT Pos Indonesia (Persero) di kantor Pos Indonesia, Jakarta. Penandatanganan itu dilakukan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. H. Sobandi, S.H., M.H. dan Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero) Siti Choiriana.

Kerja Sama dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan

Tahun 2023 Puslitbang Kumdil MA RI melibatkan 19 dari 24 perguruan tinggi yang telah bekerja sama dalam kegiatan penyusunan rekomendasi pembentukan dan evaluasi kebijakan sebagai implementasi dari perjanjian kerja sama yang telah dilakukan. Bentuk pelibatan tersebut terimplementasi dengan melibatkan para akademisi sebagai narasumber ataupun responden dalam beberapa pembahasan topik kajian, tercatat pada tahun 2023 sebanyak 45 kegiatan pembahasan topik kajian telah melibatkan para akademisi tersebut.

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Kerja Sama Multilateral

Council of ASEAN Chief Justices (CACJ)

Pada tahun 2023 CACJ sebagai organisasi resmi peradilan Asean memasuki usia tahun ke-10 sejak pertama kali diselenggarakan sebagai *Asean Chief Justice Meeting* tahun 2013 di Singapura. Sepanjang 2023, kegiatan CACJ berjalan sesuai dengan pembagian tujuh kelompok kerja yang terdiri atas *Facilitating Civil Processes within Asean, Case Management and Court Technology, Judicial Education and Training, Cross-Border Disputes involving Children, Asean+ Meetings, Asean Judiciary Portal*, dan *Future Works of CACJ*.

ASEAN Chief Justice Retreat 2023

Tahun ini tidak dilaksanakan pertemuan Ketua Mahkamah Agung Asean resmi sesuai dengan tradisi, tetapi dilaksanakan *retreat* Ketua Mahkamah Agung Asean yang diselenggarakan di Kuala Lumpur dengan Federal Court of Malaysia sebagai tuan rumah. Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H menghadiri CACJ *Retreat* dengan didampingi oleh Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Kepala Balitbangdiklatkumdil MA RI Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., dan staf khusus Ketua MA RI Dr. Aria Suyudi S.H., L.L.M.

Kegiatan Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Peradilan ASEAN

Sepanjang 2023 kegiatan Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Peradilan Asean adalah sebagai berikut.

ASEAN *Judicial Knowledge Exchange* tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dengan bekerja sama dengan pemerintah Australia melalui Australia-ASEAN Counter Trafficking (ASEAN-ACT), Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Peradilan Asean melaksanakan sesi pertukaran pengetahuan antara peradilan Filipina dan peradilan Indonesia tentang penanganan tindak pidana perdagangan orang pada bulan Oktober 2023 sebagai uji coba dari aktivitas serupa yang rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada peradilan Asean. Di Indonesia acara itu dikelola oleh Sekretariat CACJ MA RI dan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI.

Pertukaran pengetahuan ini dilakukan dua arah, yaitu hakim Filipina berkunjung dan mengikuti kegiatan pelatihan ke Indonesia (25--27 Juli 2023) dan hakim Indonesia ke Filipina (19--21 September 2023).

Pembangunan *E-Learning Platform* Peradilan ASEAN

Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Peradilan Asean bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) mengembangkan suatu platform *e-learning* bagi peradilan Asean. Platform tersebut mulai dikembangkan pada awal 2023 dan diharapkan dapat diluncurkan pada awal 2024.

CACJ *Workshop Intellectual Property Law and Practice*

Federal Court of Malaysia melalui *Judicial Appointments Committee (JAC) Judicial Education and Training Arm* menyelenggarakan *workshop Intellectual Property Law and Practice* secara *hybrid* pada tanggal 26 Oktober 2023. Lokakarya tersebut dihadiri oleh para hakim senior Malaysia dan undangan dari peradilan Asean, termasuk dari Mahkamah Agung RI.

Pengembangan Skema Pelatihan Lainnya: Perubahan Iklim dan Pelindungan Konsumen

Pada 2023 Mahkamah Agung RI telah memulai kerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH atau GIZ Jerman dan International Development Law Organization (IDLO) dalam mengembangkan modul pendidikan berkelanjutan untuk area perubahan iklim dan pelindungan konsumen.

Kerja Sama Yudisial Bilateral

Australia

Kerja sama dengan peradilan Australia merupakan kerja sama yudisial terpanjang dan tersibuk yang dimiliki oleh Mahkamah Agung RI.

Federal Court of Australia

Kunjungan Kerja Ketua Federal Court of Australia ke Indonesia

Pada 20 Maret 2023 *Chief Justice* (The Hon) James L. Allsop melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung RI dan berpartisipasi dalam beberapa agenda dialog hukum bisnis.

Kunjungan Kerja Ketua Mahkamah Agung RI ke Federal Court of Australia

Pada 1 Agustus 2023 Ketua MA RI Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. melakukan kunjungan kerja ke Federal Court of Australia dan Federal Circuit and Family Court of Australia didampingi oleh Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Perdata Dr. Yakup Ginting, S.H., M.Kn., dan staf khusus Ketua MA RI, Dr. Aria Suyudi, S.H., L.L.M.

Federal Circuit and Family Court of Australia

Kunjungan Kerja Chief Justice FCFCOA The Hon. William Alstergren ke Mahkamah Agung RI

Pada 26--27 September 2023, The Hon. Chief Justice William Alstergren didampingi oleh The Hon. Judy Ryan serta Leisha Lister dan Cate Sumner dari Law & Development Partners--yang merupakan senior advisor AIPJ2--melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung RI dalam rangka persiapan perayaan 20 tahun kerja sama yudisial FCFCoA dan Mahkamah Agung RI di bidang peningkatan akses keadilan dan pelindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Dialog Kepemimpinan Hakim Perempuan di Peradilan

Pada 14 April 2023, dalam rangka memperingati hari perempuan internasional (8 Maret), Hari Hakim Perempuan Internasional (10 Maret) dan Hari Kartini (21 April) diselenggarakan dialog mengenai Kepemimpinan Hakim Perempuan di peradilan yang difasilitasi oleh AIPJ2.

Belanda

Kerja sama bidang hukum antara badan peradilan Indonesia dan pemerintah Kerajaan Belanda dilaksanakan di bawah dua kerangka program kerja sama, yaitu (1) *Peer to Peer for Justice Indonesia-Netherlands Legal Network* dengan dukungan dari Kedutaan Besar Belanda di Jakarta dan (2) *Tailor Made Training* (TMT) dengan dukungan beasiswa dari Orange Knowledge Program (OKP) Nuffic.

Hoge Raad der Nederlanden (Mahkamah Agung Kerajaan Belanda)

Penandatanganan Perpanjangan MoU Kerja Sama Mahkamah Agung RI dan Hoge Raad

Pada tanggal 19 Januari 2023, Ketua MA RI, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. dan Presiden *Hoge Raad der Nederlanden*, Hon. Dinneke de Groot menandatangani perpanjangan MoU kerja sama yudisial antara Mahkamah Agung RI dengan *Hoge Raad der Nederlanden*.

Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)

Di bawah program TMT OKP Nuffic yang telah berlangsung sejak 2019 dan berakhir Maret 2023, terdapat tiga program utama yang diselenggarakan pada tahun terakhir, yaitu (1) sistem penilaian cakim; (2) pelatihan penulisan putusan yang baik; dan (3) reviu renstra diklat 2020--2024.

Sistem Penilaian Calon Hakim

Sebuah kelompok kerja dibentuk (sekitar 30 anggota dari dalam BLDK dan hakim eksternal) untuk mengembangkan template penilaian calon hakim (dengan indikator objektif). Melalui serangkaian lokakarya (September 2022, Januari 2023, dan Maret 2023) serta template (berdasarkan metode rubrik), telah dihasilkan penilaian yang dilakukan seobjektif mungkin dan memastikan bahwa tingkat kelulusan minimal kompetensi tercapai.

Pelatihan Penulisan Putusan yang Baik

Sebuah kelompok kerja dibentuk (sekitar 15 hakim dan perwakilan dari Direktorat Jenderal, Sekretariat Mahkamah Agung dan BLDK) untuk mengembangkan pelatihan Penulisan Keputusan yang Baik.

Reviu Renstra Pendidikan Hakim

Pada bulan Maret 2023 diadakan lokakarya 2 hari dengan staf perencanaan BLDK untuk meninjau renstra 2020--2024 dan memberikan evaluasi serta rekomendasi untuk renstra 2025--2029.

Lokakarya Integritas Hakim-Misi Akhir

Dari tanggal 13--16 Maret 2023 yang merupakan misi terakhir dari SSR dilaksanakan kegiatan Lokakarya Integritas Hakim di Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, Bogor. Lokakarya ini diharapkan dapat memperkaya dan memberi penyegaran pada Modul Pelatihan Kode Etik Hakim yang diberikan pada setiap pelatihan BLDK.

Singapura

1. Kunjungan Kerja dan Ceramah "Developing a System of International Commercial Dispute Resolution"
2. Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial dengan Mahkamah Agung Singapura
3. Seminar Internasional tentang Penyelesaian Sengketa Komersial Lintas Batas
4. *Talk Show* Peradilan Modern: Tantangan dan Kesempatan

Dewan Peradilan Agung Qatar

Pada tanggal 26 November 2023 Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Dewan Peradilan Agung Qatar menandatangani perpanjangan nota kesepahaman kerja sama di bidang peradilan. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Ketua Dewan Peradilan Agung Qatar, H.E. Syeikh Dr. Hassan Bin Lahdan Al-Hasan Al-Muhannadi.

Dewan Peradilan Agung Kuwait

Ketua MA RI dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung Kuwait (SJC Kuwait) menandatangani nota kesepahaman pada hari Kamis, 30 November 2023, bertempat di Gedung Istana Keadilan Negara Kuwait.

Kerajaan Arab Saudi

Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. bersama delegasi melakukan kunjungan istimewa untuk meninjau 35 peserta Diklat Ekonomi Syari'ah di *Higher Judicial Institute*, Universitas Imam Muhammad Bin Saud, Riyadh, Arab Saudi dalam upaya memperdalam dan meningkatkan pemahaman serta keterampilan para hakim terkait ekonomi syari'ah.

Kerja Sama dengan Mitra Pembangunan

Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2)

Sepanjang tahun 2023 AIPJ2 memberikan bantuan teknis bagi Mahkamah Agung melalui kemitraan antara Mahkamah Agung dan sektor publik pada berbagai area pembaruan, seperti Kantor Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA RI, Kelompok kerja Kemudahan Berusaha, Kelompok kerja Akses terhadap keadilan, serta proses evaluasi cetak biru pembaruan peradilan.

International Development Law Organization (IDLO)

Pada 2023 Mahkamah Agung RI merintis kerja sama dengan IDLO dalam area pengembangan kapasitas hakim Asean di bidang hukum lingkungan. IDLO didukung oleh Kementerian Luar Negeri Italia meluncurkan program *Environmental Law E-Learning Course for ASEAN Judges* pada Kamis, 7 Desember 2023.

Center for International Legal Cooperation

Center for International Legal Cooperation (CILC) merupakan mitra pembangunan internasional yang berbasis di Den Haag dan melaksanakan program pembangunan yang utamanya didukung oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Selama 2023 CILC mendukung kerja sama Mahkamah Agung RI dengan Hoge Raad Kerajaan Belanda serta Council of Judiciary Belanda (Raad voor de Rechtspraak) dengan unit kerja MA RI lainnya, seperti Sekretariat MARI dan BLDK MA RI.

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Sepanjang Juni--Juli 2023 GIZ bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera) memberikan dukungan kepada Balitbang Diklat Kumdil MA RI untuk melaksanakan Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana dan *Online Dispute Resolution* dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk hakim-hakim peradilan tingkat pertama.

The Norwegian Centre for Human Rights (NCHR)

Pada tanggal 13--17 Februari 2023, delegasi Badan Litbang Diklat Mahkamah Agung RI, yang terdiri atas perwakilan Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung RI dan 13 orang hakim pengadilan tingkat pertama berpartisipasi dalam pelatihan *Intensive Course* Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh *Norwegian Center of Human Rights* (NCHR) yang bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP).

Program Pengembangan Kapasitas tentang Hak Asasi Manusia di Oslo, Norwegia

Intensive course ini merupakan pelatihan lanjutan bagi hakim dengan materi-materi HAM yang sebelumnya diselenggarakan atas kerja sama antara Balitbang Diklat Mahkamah Agung RI dan LeIP pada tahun 2020 dan 2021 dengan dukungan penuh Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta dan didukung penuh oleh NCHR. Selama 5 hari para delegasi peserta pelatihan kembali mendapatkan beragam materi terkait HAM.

Japan International Cooperation Agency Indonesia (JICA)

Sepanjang 2023 kerja sama yang dilakukan meliputi hal berikut.

1. Program pelatihan *Knowledge Co-Creation Program* (KCCP) tentang Hak atas Kekayaan Intelektual dilaksanakan di Tokyo Jepang tanggal 17--26 Mei 2023.
2. *Pelatihan singkat (short course) Hak Kekayaan Intelektual (HKI)* yang dilaksanakan di 5 lokasi (Jayapura, Jambi, Banjarmasin, Tanjung Karang, dan Serang) yang diikuti oleh total 150 orang hakim.
3. Seminar HKI dilaksanakan pada tanggal 21--22 September 2023 dengan peserta dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
4. Penyusunan buku *Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual tentang Merek* direncanakan akan diluncurkan Januari 2024.

ClientEarth

Pada 2 Mei 2023 Kepala Balitbang Diklat MA RI Bambang H Mulyono menandatangani nota kesepahaman kerja sama pelatihan yudisial bagi para hakim Indonesia dan Asia mengenai perubahan iklim dengan Client Earth yang diwakili Dimitri De Boer, *Regional Director of Programmes, ClientEarth*. Penandatanganan dilaksanakan di gedung Balitbang Diklat Kumdil MA RI, Megamendung dan disaksikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan pimpinan MA RI.

PERAN SERTA PADA FORUM INTERNASIONAL

China-ASEAN Legal Cooperation Forum 2023

Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia menghadiri undangan the China Asean Legal Research Center (CALRC) untuk menghadiri China- Asean Legal Cooperation Forum 2023 yang diadakan di Chongqing, Tiongkok, 30 Oktober s.d. 2 November 2023.

12th International Legal Forum of The Asia Pacific Region

Ketua Kamar Perdata MA RI I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. menghadiri 12th International Legal Forum of the Asia-Pacific Region yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Federasi Rusia pada 2 Oktober 2023 dengan mengambil topik utama *Balance of Protection of National Interests and Rights of Participants of International Economic Relations*.

Workshop on Corporate and Household Insolvency, Singapura, 24--28 Juli 2023

Mahkamah Agung mengirimkan delegasi Dr. Titik Tedjaningsih, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pemilah Perkara Perdata Khusus) dan Yunani Abiyoso, S.H., M.H. (anggota Tim Asistensi Pembaruan Peradilan) untuk menghadiri lokakarya (*workshop*) dengan tajuk “Kepailitan untuk Korporasi dan Rumah tangga” pada tanggal 24 s.d. 28 Juli 2023 di Singapura.

Indo-Pacific Judicial Colloquium on Intellectual Property, Innovation and Technology 2023

Mahkamah Agung RI menghadiri Indo-Pacific Colloquium on Intellectual Property, Innovation and Technology dengan tema Intellectual Property, Innovation, and Technology di Washington DC pada tanggal 25--27 Juli 2023.

Konsultasi Regional tentang Adopsi Pedoman Umum Bangkok tentang Aplikasi Perspektif Gender bagi Hakim pada Kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara

Atas undangan Internasional Commission of Jurist yang bekerja sama dengan peradilan Maldives, Mahkamah Agung RI menghadiri konsultasi regional tentang Adopsi Pedoman Umum Bangkok tentang Aplikasi Perspektif Gender bagi Hakim pada Kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Forum ini diadakan pada 19 Maret 2023 di Pulau Kurumba, Maldives.

16th Biennial International Association of Woman Judges (IAWJ) Conference Marrakesh, 11--14 May 2023

Konferensi yang diselenggarakan di Kota Marrakesh, Negara Maroko pada tanggal 11--14 Mei 2023 ini dibuka di Grand Mogador Agdal dan diselenggarakan dan Hotel Kenzi Rose Farah Garden.

WIPO Intellectual Property Judges Forum 2023

Hakim Agung Dr. Rahmi Mulyati S.H., M.H. mewakili Mahkamah Agung RI berpartisipasi dalam WIPO Intellectual Property Judges Forum 2023 yang diselenggarakan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*) di Jenewa pada tanggal 15--16 November 2023.

Lokakarya Kolaboratif Mahkamah Agung RI dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan di *University of Lancaster*

Lokakarya yang dilaksanakan pada 13--18 Desember 2023 bertajuk *Collaborative Learning Workshop: Responding to the Triple Planetary Crisis through Legal Remedies* dan difasilitasi oleh *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* serta *Lancaster Environment Center of the Lancaster University*.

Partisipasi pada Pertemuan *Study Visit on Crime Statistic* di Australia

Kepaniteraan Mahkamah Agung bersama perwakilan dari beberapa lembaga penegak hukum (LPH) berpartisipasi dalam kunjungan kerja *Study Visit on Crime Statistics* ke *Australian Bureau of Statistics (ABS)* pada 24--28 Juli 2023.

Kunjungan Kerja Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi ke Korea Selatan

Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. Sobandi, S.H., M.H. didampingi Irwan Rosady, S.H. Mustamin, S.H., M.H. dan Rizkiansyah mengikuti kegiatan *Study Visit* Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi/*Korea Information System of Criminal Services (KICS)* di Korea Selatan dari 27 November s.d. 1 Desember 2023.

Integritas Kuat, Peradilan Bermartabat



**Mahkamah Agung
Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13
Jakarta Pusat - DKI Jakarta, Indonesia 10110
(021) 3843348, 3810350, 3457661
persuratan@mahkamahagung.go.id